

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	DINAS PENDIDIKAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					22.460.305.000		28.845.520.000		19.210.955.640		24.219.950.000		27.852.942.500		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pendidikan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pendidikan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.201.382.843	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.694.420.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.664.589.920	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.939.585.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.380.523.210	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendidikan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pendidikan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pendidikan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.224.449.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.467.940.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	8.472.803.830	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.993.821.540	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.892.894.771	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendidikan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Jumlah PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Teguran Dari Atasan	100%	100%	122.350.000	100%	102.050.000	100%	38.850.000	100%	203.100.000	100%	233.565.000	100%	Dinas Pendidikan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Pendidikan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.113.160.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	742.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	103.600.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	100.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendidikan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	-	-	-	20 Laporan	18.000.000	20 Laporan	173.058.400	20 Laporan	324.489.820	20 Laporan	373.163.293	20 Laporan	Dinas Pendidikan
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APM PAUD (%)	46	47	215.344.800	48	324.230.000	49	987.719.100	50	5.334.493.640	51	6.134.667.686	51	Dinas Pendidikan
16	Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	APM SD/MI (%)	92	92	11.292.058.000	92	4.101.500.000	93	3.182.488.500	94	12.887.441.000	95	14.820.557.150	95	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTS (%)	75	75		75		75		76		76	-	76	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI (%)	110	110		111		111		112		112	-	112	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTS (%)	96	96		97		97		98		98	-	98	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	93	93		93		94		95		96	-	96	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS (%)	77	77		77		78		78		78	-	78	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	-	0,5	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0,7	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	-	0,7	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SD/MI (%)	98	98		98		98		99		99	-	99	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	98	98		98		98		99		99	-	99	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SD/MI (%)	98	98		99		99		99		99	-	99	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SMP/MTS (%)	98	98		99		99		99		99	-	99	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/ Murid SD/MI	1:36	1:36		1:32		1:32		1:32		1:32	-	1:32	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/ Murid SMP/MTS	1:30	1:33		1:33		1:33		1:33		1:33	-	1:33	Dinas Pendidikan
		Angka Melek Huruf	99,50%	99,50%		99,60%		99,70%		99,80%		99,90%	-	99,90%	Dinas Pendidikan
17	Program Pendidikan Menengah	APK SMA/MA (%)	80	80	20.170.750.000	81	24.598.434.000	82	5.968.208.000	83	15.039.271.900	84	17.295.162.685	84	Dinas Pendidikan
		APM SMA/MA (%)	52	52		53		54		56		57	-	57	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA (%)	51	51		52		53		55		56	-	56	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,15%	0,15%		0,15%		0,10%		0,10%		0,10%	-	0,001	Dinas Pendidikan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Angka Kelulusan SMA/MA (%)	0,50%	0,50%		0,50%		0,38%		0,38%		0,38%	-	0,0038	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SMA/MA (%)	75	75		76		76		77		77	-	77	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/ Murid SMA/MA	1,33	1,33		1,33		1,33		1,33		1,33	-	1,33	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,88	8,92		8,95		9,00		9,08		9,12	-	9,12	Dinas Pendidikan
18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	99,50%	99,50%	1.092.355.200	99,60%	716.795.500	99,70%	1.401.263.750	99,80%	-	99,90%	200.000.000	99,90%	Dinas Pendidikan
19	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka Melek Huruf	99,50%	99,50%	-	99,60%	-	99,70%	-	99,80%	-	99,90%	200.000.000	99,90%	Dinas Pendidikan
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru SD dan SMP yang memiliki sertifikat pendidik	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	15% Guru SD ; 20% Guru SMP	6.106.816.500	20% Guru SD ; 25% Guru SMP	5.890.516.500	20% Guru SD ; 25% Guru SMP	5.055.690.000	20% Guru SD ; 25% Guru SMP	8.810.097.700	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	10.131.612.355	20% Guru SD ; 35% Guru SMP	Dinas Pendidikan
21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Angka Melek Huruf	99,50%	99,50%	-	99,60%	-	99,70%	-	99,80%	-	99,90%	100.000.000	99,90%	Dinas Pendidikan
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,88	8,92	3.042.608.057	8,95	1.940.680.000	9,00	3.618.772.400	9,08	134.229.000	9,12	154.363.350	9,12	Dinas Pendidikan
23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,88	8,92	13.327.050.500	8,95	8.539.613.500	9,00	12.353.827.700	9,08	-	9,12	22.000.000.000	9,12	Dinas Pendidikan
25	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,88	8,92	108.000.000	8,95	108.000.000	9,00	-	9,08	-	9,12	12.000.000.000	9,12	Dinas Pendidikan
26	Program Pembinaan Seni, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa	Peningkatan Prestasi Seni, Bakat, Kreatifitas Siswa	12 Medali/ Penghargaan	12 Medali/ Penghargaan	8.117.675.000	15 Medali/ Penghargaan	7.460.800.000	15 Medali/ Penghargaan	11.096.801.400	18 Medali/ Penghargaan	-	18 Medali/ Penghargaan	4.000.000.000	18 Medali/ Penghargaan	Dinas Pendidikan
25	Program Balai Lathan Teknologi Komunikasi	Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	15 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	15 Kab/kota	720.531.000	15 Kab/kota	828.610.650	15 Kab/kota	Dinas Pendidikan
26	Program Kursus dan Kelembagaan	Prosentase kab/kota yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	8 kab/kota									15 kab/kota	2.000.000.000	15 kab/kota	
	Program Kesetaraan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)										9,12	2.000.000.000		
					71.134.000.000		59.705.180.000		57.117.673.000		52.387.061.000		102.845.120.150		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1	DINAS KESEHATAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				25.107.604.000		28.778.490.000		24.181.472.950		42.191.720.000		46.410.892.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kesehatan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kesehatan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.946.623.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.962.601.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.474.204.953	Tidak ada pengaduan masyarakat	7.412.508.590	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.884.031.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kesehatan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kesehatan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.610.210.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.592.960.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	8.088.724.537	Tidak ada pengaduan masyarakat	24.760.016.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	10.507.574.610	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Kesehatan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Kesehatan	100%	100%	201.450.000	100%	142.800.000	100%	175.200.000	100%	379.500.000	100%	123.175.000	100%	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kesehatan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	277.589.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	287.644.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	754.286.460	Tidak ada pengaduan masyarakat	566.106.260	Tidak ada pengaduan masyarakat	700.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			279.715.900		133.278.000		143.792.000		168.981.000		29.906.500		Dinas Kesehatan
7	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar kenegaraan/ Kedaerahan	Terselenggaranya Hari-Hari Besar Kenegaraan								100%	360.976.000	100%	469.268.800	100%	Dinas Kesehatan
15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Presentase Ketersediaan Obat dan Vaksin	80%	86%	955.660.000	90%	1.017.870.000	95%	2.046.243.150	100%	1.783.924.900	100%	2.291.880.370	100%	Dinas Kesehatan
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar sebesar 90 %	90%	90%	1.838.558.000	90%	2.706.462.000	90%	6.733.436.450	90%	16.895.853.800	90%	2.760.103.800	90%	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang melayani kesehatan jiwa & Napza	2	4		6		8		12		12		12	
		Jumlah RS PONEK RS Akreditasi	5	8		9		10		11		11		11	
			4	6		10		15		20		20		20	
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	50%	55%	524.673.000	60	625.980.000	65%	2.216.388.000	70%	1.324.292.500	75%	2.000.000.000	75%	Dinas Kesehatan
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	435.338.000	100%	358.683.000	100%	712.625.000	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%	
		Persentase Balita Naik Berat Badan (N/S)	65%	70%		75%		80%		85%		90%		90%	
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	53,1%	55,0%	260.000.000	66,0%	472.943.000	66,5%	862.185.000	67,0%	1.093.978.900	70,0%	2.422.172.570	70%	Dinas Kesehatan
		% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	62,26%	67,0%		69,0%		72,0%		75,0%		80,0%		80%	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
22	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (IR)	40/100000	40/100000	7.972.468.500	40/100000	1.158.975.000	40/100000	2.684.159.500	40/100000	1.802.746.500	40/100000	3.279.693.650	40/100000	Dinas Kesehatan
		Case Fatality Rate (CFR)	<1	<1	-	<1	-	<1	-	<1	-	<1	-	<1	-
		Angka Kasus Kematian Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	20%	60,0%	-	70,0%	-	80,0%	-	95,0%	-	100,0%	-	100%	-
		% penduduk >15 menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	10,9%	15,0%	-	30,0%	-	40,0%	-	42,5%	-	45,0%	-	45%	-
		Jumlah Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasar pengakuan pemakaian)	30%	35,0%	-	45,0%	-	52,5%	-	57,5%	-	60,0%	-	60%	-
		Jumlah kasus baru TB per 100.000 penduduk	235	231	-	228	-	226	-	224	-	222	-	222	-
		Proporsi kasus TBC paru yang terdeteksi dalam program DOTS	80,0%	84,0%	-	86,0%	-	88,0%	-	90,0%	-	>90%	-	>90%	-
		Proporsi kasus TBC paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90%	92,0%	-	94,0%	-	96,0%	-	98,0%	-	98,0%	-	98%	-
		Angka Penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)	6,04	5	-	4	-	3	-	2	-	1	-	1	-
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan	100%	100%	197.400.000	100%	606.535.000	100%	122.816.800	100%	155.823.400	100%	3.500.000.000	1	Dinas Kesehatan
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Tetangannya Penderita Katarak	100%	100%	703.020.000	100%	413.686.000	100%	3.025.115.800	100%	518.890.450	100%	20.000.000.000	100%	Dinas Kesehatan (BKMM)
25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu	100%	100,0%	-	100,0%	-	100,0%	3.499.600.000	100,0%	2.000.000.000	100,0%	3.000.000.000	100%	Dinas Kesehatan
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana BKMM Dalam Persiapan Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat	95%	95,0%	-	95,0%	353.039.800	95,0%	-	95,0%	5.636.293.000	95,0%	67.522.215.000	95%	Dinas Kesehatan (BKMM)
27	Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana BKMM Dalam Persiapan Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat	95%	95,0%	-	95,0%	353.039.800	95,0%	-	95,0%	5.636.293.000	95,0%	-	95%	Dinas Kesehatan (BKMM)
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Penduduk Mempunyai Jaminan (Universal Coverage)	53,40%	65,0%	5.000.040.000	70,0%	4.007.850.000	70,0%	6.256.609.850	90,0%	3.207.500.000	90,0%	3.000.000.000	90%	Dinas Kesehatan
29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Kunjungan Neonatal Lengkap	75,00%	80,0%	207.210.000	85,0%	274.388.000	86,0%	825.883.000	88,0%	708.348.000	90,0%	2.476.275.000	90%	Dinas Kesehatan
		Kunjungan Bayi	73,63%	85,0%	-	86,0%	-	87,0%	-	90,0%	-	91,0%	-	91%	-
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita	60,23	80,0%	-	81,0%	-	83,0%	-	85,0%	-	87,0%	-	87%	-
		Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	59,95	59,96%	-	90,0%	-	94,0%	-	95,0%	-	95,0%	-	95%	-
		Puskesmas Mampu Laksana PKPR	36%	60,0%	-	70,0%	-	80,0%	-	90,0%	-	92,0%	-	92%	-

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Lansia	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	84.520.000	15 Kab/Kota	86.570.000	15 Kab/Kota	535.210.500	15 Kab/Kota	550.125.000	15 Kab/Kota	1.610.000.000	15 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	82%	90%	215.000.000	91%	433.443.000	92%	1.263.465.000	93%	1.394.784.500	95%	4.450.000.000	95%	Dinas Kesehatan
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	81,79%	88%		88%		90%		95%		100%		100%	
33	Program Penyediaan Data Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Teknologi SIKDA	3	4	178.700.000	5	140.538.000	5	133.110.000	6	178.789.000	6	300.000.000	600%	Dinas Kesehatan (UPTD BALAI DATA)
34	Program Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Informasi Kesehatan yang Avidance Base	16 Profil Kesehatan	16 Profil Kesehatan	44.450.000	16 Profil Kesehatan	1.500.000	16 Profil Kesehatan	-	16 Profil Kesehatan	-	16 Profil Kesehatan	300.000.000	16 Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan (UPTD BALAI DATA)
35	Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan	Tertanganinya Kejadian Luar Biasa < 24 Jam	95%	95%	144.170.000	95%	315.936.000	95%	391.367.000	95%	390.528.000	95%	300.000.000	95%	Dinas Kesehatan (UPTD BALAI DATA)
36	Program Upaya Ketahanan Tubuh Laboran				-		-		43.200.000		-		1.000.000.000		Dinas Kesehatan
37	Program Penanggulangan Wabah dan Bencana	Meningkatnya Kemampuan SDM dalam penanggulangan gawat darurat bencana	100%	100%	-	100%	-	100%	679.664.000	100%	488.555.000	100%	1.635.121.500	100%	Dinas Kesehatan
38	Program Kesehatan Haji	Terkontrolnya Kesehatan Jemah Haji	100%		-		-	100%	30.000.000	100%	24.118.000	100%	131.353.400	100%	Dinas Kesehatan
39	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	5 Kabupaten/ Kota	8 Kabupaten/ Kota	-	10 Kabupaten/ Kota	-	15 Kabupaten/ Kota	-	15 Kabupaten/ Kota	614.324.000	15 Kabupaten/ Kota	798.621.200	15 Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
					24.751.459.000		21.198.039.800		45.420.000.000		78.411.939.000		138.204.018.200		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB RUMAH SAKIT JIWA PROF. dr. V. L. RATUMBUYSANG														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					18.396.099.000		19.450.818.000		22.482.010.000		28.235.590.000		28.235.590.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.983.800.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.329.091.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.798.350.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.010.255.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.210.678.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	391.400.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.198.900.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.877.040.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.267.930.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.109.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang	100%	100%	116.000.000	100%	165.500.000	100%	132.000.000	100%	225.620.000	100%	227.500.000		Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	-	-	-	-	-	8 laporan 100%	3.000.000	12 laporan 100%	104.674.000	12 laporan 100%	111.000.000	32 laporan 100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
7	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Kegiatan penyelenggaraan Hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan dimanfaatkan untuk promosi kesehatan jiwa	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	9.100.000	2 paket	10.000.000	2 paket	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
15	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien di RS sesuai kebutuhan	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	2.800.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemahaman masyarakat tentang Kesehatan Jiwa semakin meningkat	60% dari jumlah kelompok masyarakat termasuk keluarga pasien	1 paket 100%	264.000.000	100%	792.000.000	2 paket 100%	3.394.500.000	100%	861.940.000	100%	900.000.000	100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
22	Program Pencegahan dan Penganggulan Penyakit Menular	Menurunnya penyebaran penyakit menular khususnya HIV/ AIDS	-	-	-	-	-	6 kelompok masyarakat sasaran 300 orang	66.950.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RS terakreditasi tahap I masa 3 tahun dan pengelolan operasional RS mengaju pada Administrasi RS BLUD	98%	1 paket 100%	191.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	200.000.000	100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuysang

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Terlaksananya pengadaan Gedung RS, Peralatan RS, obat-obatan dan logistik RS (makanan minum pasien)	6 Kegiatan 100%	83%	11.923.800.000	5 Kegiatan 100%	4.864.907.000	100%	7.368.008.000	100%	11.613.656.000	100%	13.131.821.600	100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuyang
27	Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kesehatan dan peralatan medik/ non medik & peralatan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pada masyarakat	0%	100%	280.000.000	100%	257.500.000	100%	345.000.000	-	-	-	100.000.000	-	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuyang
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu/ miskin	0%	-	-	99%	7.059.650.000	1 kegiatan 100%	11.393.750.000	23 kegiatan 50%	12.649.610.000	100%	14.000.000.000	100%	Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. V. L. Ratumbuyang
					15.150.000.000		15.667.548.000		26.368.598.000		33.642.785.000		35.200.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) NOONGAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					8.797.630.000		10.197.770.000		9.223.332.927		-		12.000.000.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik RSUD Noongan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik RSUD Noongan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	942.684.840	Tidak ada pengaduan masyarakat	825.300.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.309.167.000		-		2.309.167.000		RSUD Noongan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik RSUD Noongan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik RSUD Noongan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	142.150.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	660.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.715.376.000		-		1.715.376.000		RSUD Noongan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS RSUD Noongan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di RSUD Noongan	100%	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	162.500.000		-		162.500.000		RSUD Noongan
4	Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS	-			-		-		-		-		100.000.000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-			-		-		-		-		100.000.000		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			-		15.000.000		23.400.000		-		23.400.000		RSUD Noongan
7	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan				-		-		-		-		100.000.000		
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				-		-		1.000.000.000		-		1.000.000.000		RSUD Noongan
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				-		-		96.525.000		-		96.525.000		RSUD Noongan
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				-		-		5.500.000.000		-		5.500.000.000		RSUD Noongan
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata				3.132.121.100		6.052.152.000		5.718.630.000		-		5.718.630.000		RSUD Noongan
27	Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata				907.380.000		19.000.000		45.000.000		-		45.000.000		RSUD Noongan
28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				520.664.060		926.000.000		1.898.000.000		-		1.898.000.000		RSUD Noongan
					5.720.000.000		8.567.452.000		18.468.598.000		-		18.768.598.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
BELANJA Pegawai					3.338.134.000		3.778.880.000		3.449.627.000		4.273.860.000		4.701.246.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BLH ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BLH	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	510.140.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	506.497.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	563.499.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	531.227.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	584.350.360	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Lingkungan Hidup
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BLH ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BLH	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	598.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	762.957.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	716.919.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	451.800.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	496.980.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Lingkungan Hidup
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS BLH yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di BLH	100%	100%	72.000.000	100%	22.000.000	100%	25.750.000	100%	22.500.000	100%	24.750.000	100%	Badan Lingkungan Hidup
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja BLH	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	36.080.000	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	89.226.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	17.858.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	19.643.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			37.000.000		27.225.000		25.683.000		32.281.500		35.509.650		Badan Lingkungan Hidup
7	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan				-	-	-	-	-	-	47.000.000		51.700.000		Badan Lingkungan Hidup
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Menurunnya Volume Sampah Yang di Angkut TPA				2000 Kg Sampah Kemasan air mineral terangkut di Pulau Bunaken	278.730.000	-2000 kg sampah kemasan air mineral terangkut di pulau bunaken - Sosialisasi pengolahan sampah domestik kepada 4 kelompok	452.069.000	- Pendampingan 1 kelompok pengolahan Sampah kemasan air mineral - Bimtek pengolahan sampah domestik kepada 2 kelompok masyarakat -Sarana Persampahan 1 Paket	287.047.000	- Pendampingan 1 kelompok pengolahan sampah kemasan air mineral - Bimtek pengolahan sampah domestik kepada 2 kelompok masyarakat	315.751.700	- 4000 Kg sampah kemasan air mineral terangkut dari pulau bunaken - Pendampingan 1 kelompok pengolahan sampah kemasan air mineral -Bimtek/sosialisasi persampahan 8 kelompok masyarakat	Badan Lingkungan Hidup
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terminimalisasi Pencemaran Lingkungan yang merusak kualitas air dan udara		- 4 Kab/Kota Mendapat Penghargaan Adipura - 4 Sungai dan 3 Danau Terpantau Kualitas Airnya - Kota Terpandu Kualitas Udara Ambient - Penanganan Kasus Link 8 Kasus	1.016.887.000	- 5 Kab/Kota Mendapat penghargaan adipura - 4 Sungai dan 2 danau terpantau kualitas airnya - 4 kota terpantau kualitas udara Ambient - Penanganan kasus link 13 kasus	746.096.000	- 6 Kab/kota mendapata penghargaan adipura - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient - Penanganan kasus link 6 kasus	969.890.000	- 6 Kab/kota mendapat penghargaan adipura - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya - 6 Kota terpantau kualitas udara Ambiet - Penanganan kasus link 4 kasus	759.222.400	- 6 Kab/kota mendapata penghargaan adipura - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient - Penanganan kasus link 6 kasus	835.144.640	- 6 Kab/kota mendapat penghargaan adipura - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya - 4 Sungai dan 4 danau terpantau kualitas airnya - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient - 6 kota terpantau kualitas udara Ambient - Penanganan kasus link 6 kasus - Penanganan kasus link 6 kasus	Badan Lingkungan Hidup

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1		Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan link sudah terintegrasi kedalam kebijakan, rencana, dan/atau program daerah		- 1 dok RPLH - 1 dok KLHS - Binwas amdal UKL/UPL 1 keg - Evaluasi 2 dok amdal		- Draft Ekoregion 1 Dok - Evaluasi Implementasi Penerapan KLHS 8 Kab/kota		- Diseminasi Amdal 1 Keg - Evaluasi Implementasi penyusunan KLHS 15 kab/kota		- Binwas UKL/UPL 15 Kab/kota - Bimtek pelaporan UKL/UPL 1 keg - Sosialisasi naskah akademik RPPLH 1 keg - Diseminasi amdal 1 keg		- Binwas UKL/UPL 15 kab/kota - Bimtek pelaporan UKL/UPL 1 keg - Sosialisasi Naskah akademik RPPLH 1 keg Diseminasi Amdal 1 keg		- 1 dok RPPLH - 1 dok KLHS - Draft Ekoregion 1 dok - Bimtek pelaporan UKL/UPL 3 keg - Evaluasi implementasi KLHS 15 kab/kota - Binwas UKL/UPL 15 kab/kota - Sosialisasi naskah akademik RPPLH 2 keg - Diseminasi amdal 2 keg	Badan Lingkungan Hidup
17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Menurunnya laju kerusakan lingkungan		- Pemantauan Kualitas air laut 2 kali dalam 1 tahun - Kajian kerentanan teluk manado 1 laporan - Penyusunan Profil kehati sulut 1 dokumen - Kalpataru 3 Orang, Adiwiyata 5 sekolah, kampung Hijau 1 lokasi	538.919.000	- Penanaman pohon di sumber mata air 25 lokasi - Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di pesisir 1 paket - Pengembangan TAMAN KEHATI Sulut 1 Lokasi - Pengembangan FORUM KEHATI Sulut 1 lokasi - Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan 2 lokasi - Kalpataru 3 orang, Adiwiyata 5 Sekolah	810.135.400	- Penanaman Pohon di sumber mata air 25 lokasi - Fasilitas Pokja Mangrove 1 kegiatan - Pengembangan Taman KEHATI Sulut 1 Lokasi - Fasilitas Forum DAS Tondano 1 kegiatan Inventarisasi pelaku usaha pengguna BPO 10 usaha - Kalpataru 3 Orang, Adiwiyati 10 sekolah	724.794.300	- Penanaman pohon sumber mata air 25 lokasi - Penanaman Mangrove 5000 pohon - Pengembangan taman KEHATI Sulut 1 lokasi - Fasilitas Forum DAS Tondano 1 kegiatan - Inventarisasi pengguna BPO sektor MAC 100 mobil - Kalpataru 3 Orang, Adiwiyati 12 sekolah	437.807.500	- Penanaman Pohon sumber mata air 25 lokasi - Penanaman Mangrove 5000 pohon - Pengembangan Taman KEHATI sulut 1 lokasi - Fasilitas Forum DAS Tondano 1 kegiatan - Inventarisasi Pengguna BPO Sektor MAC 100 mobil - Kalpataru 3 Orang, Adiwiyati 12 sekolah	481.588.250	- Penanaman pohon pada sumber mata air 100 titik - Penanaman Mangrove 10.000 pohon - Taman KEHATI 1 lokasi - Forum DAS Tondano 3 keg - Pengguna BPO sektor MAC 200 mobil - Penerima penghargaan kalpataru 15 Orang - 34 Sekolah Adiwiyata - Profil Kehati SULUT 1 dok	Badan Lingkungan Hidup
18	Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Meningkatnya luasan tutupan karang hidup		-		-		Restorasi Terumbu Karang 1 Lokasi	133.945.000	-		Restorasi Terumbu Karang 1 Lokasi	100.000.000	Restorasi Terumbu Karang 2 Lokasi	Badan Lingkungan Hidup
19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan		- SLHD 1 dok - Rakor PLH 1 keg - Pekan link 1 keg - Pameran dan promosi 1 keg	340.974.000	- SLHD 1 dok - Rakor PLH 1 keg - Pekan link 1 keg - Pameran dan promosi 1 keg	246.358.500	- SLHD 1 dok - Rakor PLH 1 keg - Pekan link 1 keg - Pameran dan promosi 1 keg	448.224.500	- SLHD 1 dok - Rakor PLH 1 keg - Pekan link 1 keg - Pameran dan promosi 1 keg	423.288.000	- SLHD 1 dok - Rakor PLH 1 keg - Pekan link 1 keg - Pameran dan promosi 1 keg	465.616.800	- SLHD 5 dok - Rakor PLH 5 keg - Pekan link 5 keg - pameran dan promosi 5 keg	Badan Lingkungan Hidup
					3.150.000.000		3.400.000.000		4.150.000.000		3.010.032.000		3.411.035.200		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS PEKERJAAN UMUM														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					36.044.958.500		40.344.370.000		29.776.386.431		37.309.310.000		37.309.310.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas PU ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas PU	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.463.718.492	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.154.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.938.833.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.298.850.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.219.690.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas PU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas PU ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas PU	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	12.242.427.518	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.550.205.850	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.359.860.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.637.931.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.071.782.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas PU
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas PU yang pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas PU	100%	100%	400.000.000	100%	300.000.000	100%	265.650.000	100%	-	100%	100.000.000	100%	Dinas PU
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas PU	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	523.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	523.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	585.513.929	Tidak ada pengaduan masyarakat	299.722.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	299.722.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas PU
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	12 bulan laporan skpd	12 bulan laporan skpd	100.000.000	12 bulan laporan skpd	100.000.000	12 bulan laporan skpd	439.233.300	12 bulan laporan skpd	287.237.000	12 bulan laporan skpd	287.237.000	12 bulan laporan skpd	Dinas PU
7	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	8,86 km panjang jalan	10,94 km panjang jalan	10.940.228.800	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000.000	-	Dinas PU
8	Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Tersedianya tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	56 ha luas tanah	56.000.000.000	56 ha luas tanah	56.000.000.000	56 ha luas tanah	Dinas PU	
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanakannya program pengendalian pemanfaatan ruang melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan instrumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Penataan Ruang	15 kab/kota	15 kab/kota	2.575.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000.000	-	Dinas PU
18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	68,23 km dari 940.330 km	87,74 km dari 940.330 km	87.742.666.000	83,89 km dari 940.330 km	83.888.556.800	60,73 km dari 940.330 km	91.089.343.700	79,47 km dari 940.330 km	158.932.667.000	95,36 km dari 940.330 km	197.162.989.000	95,36 km dari 940.330 km	Dinas PU
20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terinspeksinya kondisi jalan dan jembatan	940,33 km	940,33 km	200.000.000	940,33 km	200.000.000	940,33 km	200.000.000	940,33 km	125.000.000	940,33 km	125.000.000	940,33 km	Dinas PU
22	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Tersusunnya database jalan dan jembatan	940,33 km	940,33 km	1.110.174.950	940,33 km	800.000.000	940,33 km	700.000.000	940,33 km	525.000.000	940,33 km	917.593.000	940,33 km	Dinas PU
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinausahaan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan laboratorium, alat berat dan perbengkelan	1 unit alat berat	1 unit alat berat	1.033.400.000	2 unit alat berat	3.058.400.000	6 unit alat berat	6.052.500.000	4 unit alat berat	4.251.000.000	4 unit alat berat	4.251.000.000	4 unit alat berat	Dinas PU
			1 unit alat laboratorium	1 unit alat laboratorium		1 unit alat laboratorium		1 unit alat laboratorium		3 unit alat laboratorium		3 unit alat laboratorium		3 unit alat laboratorium	Dinas PU

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irgasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada	1367,92 ha persawahan	1257,06 ha persawahan	12.570.565.000	2329,88 ha persawahan	27.958.582.400	2303,29 ha persawahan	27.639.476.000	1901,77 ha persawahan	28.526.477.000	2282,12 ha persawahan	29.326.477.000	2282,12 ha persawahan	Dinas PU
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1 drainase desa/ kelurahan	14 drainase desa/ kelurahan	2.620.785.500	34 drainase desa/ kelurahan	3.218.259.300	18 drainase desa/ kelurahan	13.866.340.000	67 titik drainase di jalan propinsi	16.940.000.000	67 titik drainase di jalan propinsi	16.440.000.000	67 titik drainase di jalan propinsi	Dinas PU
		7 SPAM desa/ kelurahan	6 SPAM desa/kelurahan		10 SPAM desa/ kelurahan		26 SPAM desa/ kelurahan							Dinas PU	
28	Program Pengendalian Banjir	Terjaminnya keselamatan Jiwa dan pemukiman masyarakat pesisir dari terjanngan ombak/ gelombang	4 meter talud pengaman pantai	71,16 meter talud pengaman pantai	2.134.678.440	56,24 meter talud pengaman pantai	1.687.082.395	81,83 meter talud pengaman pantai	2.454.881.000	-	-	-	3.000.000.000	-	Dinas PU
29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya perencanaan pengembangan infrastruktur		1 PJU desa/kelurahan	18.543.656.700	5 PJU desa/ kelurahan	95.123.656.700	7 PJU desa/ kelurahan	138.275.000.000	1 PJU kantor dinas	100.000.000	1 PJU kantor dinas	100.000.000	1 PJU kantor dinas	Dinas PU
		10 ha lahan untuk infrastruktur	17 ha lahan untuk infrastruktur		94 ha lahan untuk infrastruktur		35,95 ha lahan untuk infrastruktur							Dinas PU	
30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya peningkatan kualitas permukiman desa/ kelurahan	22 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	68 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	29.749.698.600	206 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	31.090.203.751	282 revitalisasi permukiman desa/ kelurahan	130.236.966.000	67 titik drainase di jalan propinsi	150.000.000	67 titik drainase di jalan propinsi	150.000.000	67 titik drainase di jalan propinsi	Dinas PU
		26 jalan akses desa/ kelurahan	79 jalan akses desa/ kelurahan		158 jalan akses desa/ kelurahan		126 jalan akses desa/ kelurahan							Dinas PU	
31	Program Perencanaan untuk Tata Ruang	Terlaksananya proses penyusunan kebijakan penataan ruang berupa penyusunan RTRW, RDTR, dan Peraturan Zonasi, melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik, sosialisasi, workshop, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis yang memenuhi syarat inklusif, dan meningkatnya tingkat pengetahuan aparaturnya penataan ruang	15 kab/kota	-	-	15 kab/kota	100.000.000	15 kab/kota	100.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-	Dinas PU
32	Program Pengendalian Ruang	Tersusunnya kebijakan pengendalian ruang		-	-	15 kab/kota	1.100.000.000	15 kab/kota	1.950.000.000	15 kab/kota	965.500.000	15 kab/kota	300.000.000	15 kab/kota	Dinas PU
33	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan		-	-	37 (m) jembatan	3.764.760.150	33 (m) jembatan	5.038.838.000	46 (m) jembatan	7.000.000.000	120 (m) jembatan	24.000.000.000	120 (m) jembatan	Dinas PU
34	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Semakin meningkatnya pemahaman tentang aturan Jasa Konstruksi dan sertifikasi tenaga ahli penyedia jasa konstruksi		-	-		-		-		-		300.000.000	-	
					187.950.000.000		262.616.907.346		429.192.435.129		283.039.385.000		439.051.491.400		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tersusunnya Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan Antar negara		1											
		Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Negara		1											
		Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Perbatasan Antar Negara		1											
		fasilitas Penyelenggaraan Regular Dialog Dengan Pemerintah Filipina (Regular Dialogs With Government Of The Philippines)													
		Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumber daya Lokal, Kemitraan, Jaringan Pengelolaan dan Berkelanjutan						1		1					
		Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan						2		2					
		Optimalisasi Diplomasi Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional		3		40									
		Peningkatan Kualitas Permukiman di Perbatasan dan Pulau Terluar		1											
		Tersedianya Data Base Infrastruktur Diseluruh Kawasan Perbatasan													
		fasilitas Penyelenggaraan Perjanjian Pencegahan Bahaya Teroris (Terrorism Latent and Action Surveillance and Prevention Agreement)													
		Sosialisasi Potensi Pariwisata di 11 Pulau Terluar				1		1							
		Membuka dan memperlancar akses/jalur perdagangan						1							
		Pengawasan/supervisi konstruksi				2									
		Penyusunan detail desain				2									
		Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program				1									
		Strategis pembangunan Permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIK)				2									
		Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)		3											
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)		13		13									
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terbentuknya Forum koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat provinsi		1 lap	-	4 kali koordinasi	213.200.000	4 kali koordinasi	499.036.785	912.027.000	4 kali koordinasi	1.500.000.000		BAPPEDA	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		RP4D (Rencana Pembangunan Perumahan dan Prasaarana Permukiman Daerah)				1 buku									
		kajian sistem transportasi perkotaan				1 buku									
		pemetaan kawasan tujuan wisata						1 buku							
25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Master Plan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		-			-	1 buku	143.391.300		24.001.800		50.000.000		BAPPEDA
		Sosialisasi Master Plan Pembangunan Daerah Rawan Bencana								1 lap					
26	Program Pengembangan Data/ Informasi	Cakupan updating data informasi perencanaan daerah		50%	50.000.000	50%	27.000.000	50%	36.250.000	60%	98.882.000	60%	1.800.000.000		BAPPEDA
27	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Cakupan konsistensi penelitian dan pengmetnagan pembangunan daerah		60%	174.560.000	65%	57.000.000	65%	295.220.000	70%	378.885.150	70%	600.000.000	70%	BAPPEDA
28	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan konsistensi perencanaan pembangunan daerah		-			-	80%	76.041.000	80%	-	80%	100.000.000		BAPPEDA
30	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan ketaatan terhadap tata ruang		-			-		-	90%	442.691.000	90%	500.000.000		BAPPEDA
31	Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	Cakupan penanganan kawasan pengembangan ekonomi terpadu		-			-		-	90%	444.120.000	90%	700.000.000		BAPPEDA
					7.650.000.002		7.034.854.000		11.200.000.000		13.473.035.300		23.780.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				4.316.826.000		4.891.920.000		4.840.669.700		6.141.980.000		7.400.000.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pemuda dan Olahraga ; indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pemuda dan Olahraga	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	673.259.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	520.259.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.098.366.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	920.248.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.475.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pemuda dan Olahraga ; indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pemuda dan Olahraga	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	682.787.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	537.622.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	959.060.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	165.144.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	885.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Pemuda dan Olahraga yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga	100%	100%	60.000.000	-	-	100%	37.500.000	100%	33.750.000	100%	40.000.000	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-			-		-		-		-		50.000.000		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan Tahunan/tahun sesuai peraturan perundangan.	24	24	186.015.200	35	103.207.700	35	139.230.000	35	47.217.000	35	190.000.000	35	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Cakupan wilayah pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda	3 Kab/Kota / 20 org	2 keg / 15 Kab/Kota / 50 org	184.052.250	-	-	1 keg / 2 Kab/Kota	69.974.000	-	15 Kab/Kota	160.000.000	-	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara	
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan wilayah peningkatan peran serta kepemudaan; jumlah pemuda dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan, pemilihan pemuda pelopor, aksi bakti sosial, pembinaan dan pendidikan dasar-dasar kepemimpinan kepemudaan	11 Kab/Kota / 4 keg / 1280 org	3 keg / 100 org	451.115.550	3 keg / 100 org	158.095.500	1 keg / 850 org	931.069.650	2 keg / 200 org	221.831.400	15 Kab/Kota / 1800 orang	2.101.498.000	15 Kab/Kota / 1800 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
17	program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang dilatih berwirausaha			-		-	1 keg / 60 org	89.483.100	-	100 orang	115.000.000	100 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara	
19	program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah atlit, pelatih, dan wasit; jumlah cabang olahraga yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, pendataan, seminar, rapat, sertifikasi bagi tenaga keolahragaan dan database keolahragaan	5 keg / 360 org / 11 Kab	4 keg / 500 org / 15 Kab/kota	233.063.000		-	1 keg / 15 Kab/Kota	33.755.500	1 keg / 250 org	130.995.900	345 orang / 32 Cabor	2.550.000.000	345 orang / 32 Cabor	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20	program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah atlet berbakat dan berpotensi; jumlah klub olahraga junior; jumlah atlet dan cabor yang ikut TC; jumlah cabor yang berkompetisi di tingkat nasional; jumlah peserta dalam pembinaan olahraga jasmani dan rekreasi/tradisional; jumlah peserta dalam kompetisi olahraga	7 keg / 1962 orang / 5 cabor	7 keg / 109 org / 3 cabor	6.400.747.400	3 keg / 109 org / 3 cabor	11.151.815.300	7 keg / 68 org / 3 cabor	5.343.625.700	8 keg / 450 org / 2 org atlet nasional	5.125.884.500	2770 orang / 10 klub / 1 keg / 15 dan 32 cabor	14.118.000.000	2770 orang / 10 klub / 1 keg / 15 dan 32 cabor	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
21	program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Cakupan wilayah pembangunan, pemantauan, pendataan, konsultasi dan monitoring sarana prasarana keolahragaan dan kepemudaan; jumlah kegiatan dan paket pengadaan	2 keg / 4 Kab/Kota / 20 orang	2 keg / 15 Kab/Kota	1.678.960.000	2 keg / 15 Kab/kota	7.820.760.000	4 keg / 15 Kab/Kota	7.095.482.500	15 Kab/Kota / 4 keg	8.468.000.000	15 Kab/Kota / 4 keg	11.250.000.000	15 Kab/Kota / 4 keg	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
	Program Pengawasan Kepemudaan dan Keolahragaan	cakupan pengawasan kepemudaan dan keolahragaan	100% (15kab/kota)									100%	3.000.000.000		
					10.550.000.000		20.291.760.000		15.797.547.150		15.113.071.000		35.934.498.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				3.959.817.000		4.535.610.000		2.675.352.477		3.334.250.000		3.567.647.500		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BKPM ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BKPM	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	598.929.500	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	684.336.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	568.858.500	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	438.644.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	613.986.950	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	BKPM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BKPM ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BKPM	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	184.509.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	1.390.380.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	124.250.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	417.139.750	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	390.000.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	BKPM
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS BKPM yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di BKPM	100%	100%	73.350.000	100%	31.000.000	100%	23.000.000	100%	32.500.000	100%	65.000.000	100%	BKPM
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja BKPM	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	2.500.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	22.500.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	-	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	-	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	100.000.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	BKPM
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	32.890.500	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	54.010.500	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	63.895.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	115.170.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	135.170.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	BKPM
15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Tertaksananya Promosi Investasi	-	100%	1.539.934.000	100%	1.349.712.000	100%	2.239.167.000	100%	1.427.034.250	100%	2.148.041.050	100%	BKPM
16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Terciptanya realisasi Investasi	-	100%	568.924.000	100%	482.702.000	100%	547.302.500	100%	138.803.000	100%	565.000.000	100%	BKPM
17	program penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya kajian Potensi Unggulan daerah	-	100%	98.963.000	100%	135.359.500	100%	93.527.000	100%	-	100%	82.802.000	100%	BKPM
					3.100.000.000		4.150.000.000		3.650.000.000		2.569.291.000		4.100.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					6.864.439.000		7.974.100.000		6.336.513.000		7.886.960.000		8.439.047.200		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	714.210.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	742.797.750	Tidak ada pengaduan masyarakat	830.530.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	744.717.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	796.848.153	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	952.330.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.339.464.250	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.397.956.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.424.185.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.495.395.090	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	91	89	29.800.000	84	44.800.000	83	42.500.000	84	78.000.000	84	82.680.000	84	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	84.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	64.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	50.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	55.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	38.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	19	19	41.568.000	19	74.340.000	20	106.690.000	20	72.248.600	20	122.439.900	20	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	54.530	271.874.000	55.599	204.447.000	56.669	702.693.000	57.738	328.464.000	58.807	484.405.900	58.807	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
16	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru	2.356	197	1.489.575.750	297	1.357.673.000	247	1.455.817.000	247	1.250.158.200	247	1.716.800.000	3.591	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	53.461	54.530	625.650.000	55.599	601.420.000	56.669	730.255.000	57.738	381.156.000	58.807	875.000.000	58.807	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasai	Jumlah Koperasi Aktif	3.292	3.358	440.992.250	3.424	271.058.000	3.490	483.558.000	3.555	251.569.500	3.621	1.628.030.600	3.621	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara
					4.650.000.000		4.700.000.000		5.800.000.000		4.585.500.000		7.239.799.643		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				11.649.161.000		13.205.460.000		10.465.442.958		13.050.450.000		13.050.450.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada aduan	Tidak ada aduan	1.226.015.000	Tidak ada aduan	1.095.555.000	Tidak ada aduan	1.353.370.045	Tidak ada aduan	1.450.953.500	Tidak ada aduan	1.596.048.850	Tidak ada aduan	Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada aduan	Tidak ada aduan	1.323.035.000	Tidak ada aduan	2.119.400.000	Tidak ada aduan	2.604.300.700	Tidak ada aduan	1.895.387.500	Tidak ada aduan	2.084.926.250	Tidak ada aduan	Sekretariat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100%	99.250.000	100%	127.350.000	100%	102.300.000	100%	99.800.000	100%	109.780.000	100%	Sekretariat
4	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS				-		-		-		-		-		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/ujian sertifikasi	25 pegawai yang mengikuti Sertifikasi barang/jasa	25 pegawai yang mengikuti Sertifikasi barang/jasa	17.800.000	25 pegawai yang mengikuti Sertifikasi barang/jasa	17.500.000		-		-		50.000.000		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	10 laporan	10 laporan	195.000.000	15 laporan	171.732.000	20 laporan	155.255.000	30 laporan	302.254.300	35 laporan	332.479.730	35 laporan	Sekretariat
7	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Partisipasi Disnakertrans Prov. Sul ut dalam penyelenggaraan hari ulang tahun provinsi dan hari besar kenegaraan			-		-		-		19.860.000		21.846.000		Sekretariat

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat da kewirausahaan	20% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 15% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 10% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	20% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 15% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 10% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	1.545.005.000	35% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 25% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 25% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	1.017.615.000	50% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 35% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 35% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	1.694.904.600	65% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 50% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 45% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	1.955.309.800	80% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 65% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 60% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	2.150.840.780	80% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi); 65% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat); 60% (dari asumsi tenaga kerja/pencaker yang mendaftar/terdaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan)	UPTD BPPD dan KKB Bitung dan Bidang Binapenta
16	Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan melalui Job Fair	20% (dari yang terdaftar)	20% (dari yang terdaftar)	511.320.000	35% (dari yang terdaftar)	-	50% (dari yang terdaftar)	-	65% (dari yang terdaftar)	114.301.000	80% (dari yang terdaftar)	125.731.100	80% (dari yang terdaftar)	Bidang Binapenta
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan melalui Job Fair	20% (dari yang terdaftar)	20% (dari yang terdaftar)	-	35% (dari yang terdaftar)	184.050.000	50% (dari yang terdaftar)	159.691.800	65% (dari yang terdaftar)	-	80% (dari yang terdaftar)	150.000.000	80% (dari yang terdaftar)	Bidang Binapenta
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja di Provinsi/Kab/Kota di Sulut			457.575.000		94.918.000		262.245.000		181.257.000		150.000.000		Bidang HIP & Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
19	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	40% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 30% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	40% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 30% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	-	50% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 30% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	116.060.000	60% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 40% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	157.908.500	70% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 45% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	1.110.949.500	80% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 50% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	1.222.044.450	80% (Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dan 50% (Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif)	Bidang HIP
20	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan serta Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	20% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 10% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	20% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 10% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	-	25% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 20% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	60.835.000	30% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 30% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	212.144.355	35% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 40% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	45.470.400	40% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 50% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	50.017.440	40% (dari jumlah perusahaan yang diperiksa); 50% (dari jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan)	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, UPTD KK dan
21	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi	100 KK	100 KK	25.000.000	100 KK	3.518.985.000	100 KK	197.880.000	100 KK	33.248.000	100 KK	36.572.800	100 KK	Bidang Ketranasmigrasian
					5.400.000.000		8.524.000.000		6.900.000.000		7.208.791.000		8.080.287.400		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN KETAHANAN PANGAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				5.295.866.000		6.100.700.000		5.123.019.595		6.384.920.000		6.384.920.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Ketahanan Pangan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Ketahanan Pangan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	344.850.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	427.845.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	542.930.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	488.351.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	785.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	BKP Sulut
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Ketahanan Pangan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Ketahanan Pangan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	728.250.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.081.300.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	710.614.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	487.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.030.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	BKP Sulut
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Ketahanan Pangan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Ketahanan Pangan	100%	100%	30.400.000	100%	78.000.000	100%	32.778.700	100%	38.000.000	100%	175.000.000	100%	BKP Sulut
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	73.600.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	76.150.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	BKP Sulut
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	14 Laporan	14 laporan	41.200.000	14 laporan	34.500.000	14 laporan	26.200.000	14 laporan	16.500.000	14 laporan	30.000.000	70 laporan	BKP Sulut
7	Program Penyelenggaraan hari Hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	201.600.000	1 Paket	230.000.000	2 Paket	BKP Sulut
16	Program peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (jumlah cadangan pangan pemerintah daerah)	30 ton	65 Ton	1.605.300.000	31 Ton	1.378.354.800	33 Ton	2.487.476.700	30 Ton	1.942.100.000	31 Ton	3.673.850.000	31 Ton	BKP Sulut
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	50%											*100%	
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	50%											80%	
		Penanganan daerah rawan pangan	30%											100%	
					2.750.000.000		3.000.000.000		3.800.000.000		3.247.151.000		6.000.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				2.568.709.000		2.910.150.000		2.524.402.402		3.166.280.000		3.482.908.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	439.414.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	579.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	713.294.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	577.276.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.685.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	551.670.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	821.736.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	915.182.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	606.291.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.110.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	100%	68.000.000	100%	14.000.000	100%	27.000.000	100%	35.500.000	100%	40.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	150.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	199.300.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	61.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	31.125.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	10.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			58.216.000		53.500.000		60.923.000		30.689.300		55.000.000		Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	1 Dokumen Perda	2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak	453.000.000	2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak	176.295.000	1 Kebijakan (tumbuh kembang anak/ kota layak anak), 1 Workshop Peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik dan Movev	512.242.400	1 Naskah Akademik Ranperda Kesetaraan dan Keadilan Gender	515.196.400	Rancangan Peraturan Daerah Kesetaraan dan Keadilan Gender	495.000.000	Rancangan Peraturan Daerah Kesetaraan dan Keadilan Gender	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Program Penguatan Lembaga Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya Jumlah Lembaga Peduli Perempuan dan Anak	2 Organisasi	2 Organisasi	347.700.000	2 Organisasi	476.808.000	2 Organisasi	537.846.200	2 Organisasi	769.446.100	2 Organisasi	940.000.000	2 Organisasi	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	30%	40%	302.000.000	50%	413.985.000	60%	594.460.400	70%	325.325.000	80%	635.000.000	80%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	30%	40%		50%		60%		70%		80%		80%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,05%	65,48%		65,90%		66,50%		67,20%		68,00%		68,00%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,00%	67,32%		65,90%		66,50%		67,20%		68,00%		68,00%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Ratio Kekerasan dalam rumah tangga	0,40%	0,40%		0,30%		0,30%		0,30%		0,20%		0,20%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	31,84%	31,84%	280.000.000	33,00%	234.876.000	35,00%	1.333.090.000	37,00%	923.211.200	39,00%	1.010.000.000	39,00%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	5	5		8		10		12		14		14	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Porporasi Kursi parlemen yang diduduki perempuan	25,00%	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kader parpol perempuan yg mendapatkan pendidikan politik	50	50		100		150		200		200		200	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	-	25,00%	30.000.000	30,00%	64.960.400	50,00%	309.561.600	75,00%	220.000.000	75,00%			Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2.650.000.000		3.000.000.000		4.820.000.000		4.123.622.000		6.200.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					13.168.684.000		14.875.580.000		12.082.086.976		15.154.900.000		16.670.390.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	650.157.550	Tidak ada pengaduan masyarakat	750.035.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	992.828.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.312.296.050	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.443.525.550	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	698.144.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.503.372.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.798.933.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.888.969.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.512.616.250	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Jumlah PNS di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yang Mendapatkan Teguran Dari Atasan	100%	100%	90.900.000	100%	75.250.000	100%	107.250.000	100%	373.000.000	100%	217.800.000	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	23.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	70.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	187.800.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	42.660.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	71.926.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	15 Laporan (100%)	15 Laporan (100%)	71.087.150	15 Laporan (100%)	136.350.000	15 Laporan (100%)	255.760.000	15 Laporan (100%)	69.013.000	15 Laporan (100%)	75.914.300	15 Laporan (100%)	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
7	Program Hari-hari Besar Kenegaraan/ kedaerahan	Berkembangnya kemitraan, kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran)	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan Pameran	76.325.000	1 Kegiatan Pameran	83.957.500	1 Kegiatan Pameran	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
8	Program Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara	0 Meter	37.543 Meter	5.855.000.000	51.400 Meter	8.000.000.000	44.933 Meter	7.097.000.000	33.677 Meter	5.050.076.000	33.486 Meter	5.023.000.000	201.039 Meter	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
15	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya Buku Perencanaan Untuk Pembangunan Pelabuhan	2 Buku Perencanaan	5 Buku Perencanaan	1.229.600.000	7 Buku Perencanaan	1.549.832.250	3 Buku Perencanaan	2.524.265.000	8 Buku Perencanaan	4.401.500.000	7 Buku Perencanaan	7.016.650.000	20 Buku Perencanaan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi	-	12 Kegiatan	528.894.450	12 Kegiatan	530.444.450	12 Kegiatan	441.303.200	12 Kegiatan	470.376.750	12 Kegiatan	1.382.164.500	60 Kegiatan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
16	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Tersedianya Fasilitas LLAJ	-	1 Paket Fasilitas LLAJ	606.000.000	1 Paket Fasilitas LLAJ	202.750.000	-	-	-	-	-	5.000.000.000	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.428.395.850	-	-	-	-	300.000.000	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya Pemahaman Pengemudi Angkutan Umum Terhadap Aturan Dalam Berkendara	100%	100%	6.675.666.850	100%	8.517.815.400	100%	1.106.067.100	100%	486.001.000	100%	2.060.830.000	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	
18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah Informasi Yang Tersedia	1 Paket dan 12 Kegiatan	1 Paket dan 12 Kegiatan	473.550.000	1 Paket dan 8 Kegiatan	396.150.000	1 Paket dan 8 Kegiatan	2.591.649.250	1 Paket dan 8 Kegiatan	1.124.080.000	1 Paket dan 8 Kegiatan	1.957.138.500	5 Paket dan 60 Kegiatan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	
19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya Rambu - Rambu Lalu Lintas Untuk Mengurangi Kecelakaan	50 Rambu Lalu Lintas	100 Rambu Lalu Lintas dan 0 Meter Pagar Pengaman Jalan	1.353.000.000	760 Rambu Lalu Lintas dan 300 Meter Pagar Pengaman Jalan	1.079.770.000	361 Rambu Lalu Lintas dan 1724 Meter Pagar Pengaman ; Jalan ; 5000 Meter Marka Jalan	4.244.050.000	540 Rambu Lalu Lintas dan 53000 Meter Pagar Pengaman Jalan ; 1460 Meter Marka Jalan	4.452.625.000	600 Rambu Lalu Lintas dan 2000 Meter Pagar Pengaman Jalan ; 100000 Meter Marka Jalan	5.414.000.000	1521 Rambu Lalu Lintas ; 50.000 Marka Jalan ; 6524 Meter Pagar Pengaman Jalan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	
22	Program pengembangan keterbukaan informasi	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Sulut	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.633.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.796.850.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	
					18.255.000.000		22.811.770.000		24.775.302.000		22.380.422.600		35.356.372.600			

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					4.031.296.000		4.612.340.000		3.662.159.336		4.589.360.000		5.048.296.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	451.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	399.960.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	732.414.790	Tidak ada pengaduan masyarakat	630.987.620	Tidak ada pengaduan masyarakat	694.086.382	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	724.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	365.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	408.895.010	Tidak ada pengaduan masyarakat	385.792.750	Tidak ada pengaduan masyarakat	424.372.025	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	28.000.000	100%	74.000.000	100%	24.000.000	100%	32.000.000	100%	35.200.000	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	120.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	80.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	81.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	86.188.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	94.806.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			148.000.000		215.132.000		158.250.000		44.164.600		48.581.060		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
15	Program Peningkatan Keamanan Dan kenyamanan Lingkungan	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	40 LSM/ Ormas/ OKP	40 LSM/ Ormas/ OKP	50.000.000	40 LSM/ Ormas/ OKP	121.375.000	40 LSM/ Ormas/ OKP	1.402.975.000	50 LSM/ Ormas/ OKP	621.433.200	50 LSM/ Ormas/ OKP	683.576.520	50 LSM/ Ormas/ OKP	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
16	Program Pemeliharaan Kantarantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka Kriminalitas	13.000 Kasus	12.500 Kasus	207.000.000	12.000 Kasus	122.250.000	12.000 Kasus	1.039.490.000	12.000 Kasus	1.156.786.350	12.000 Kasus	1.272.464.985	12.000 Kasus	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditind+C525akanjuti	2	2	250.000.000	2	233.500.000	1	509.000.000	1	472.255.400	1	519.480.940	1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	2	275.000.000	2	201.408.000	1	443.900.200	1	488.539.950	1	537.393.945	1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah laporan kasus pelanggaran penyakit masyarakat ke Kesbangpol	12	12	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Prosentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	100%	100%											Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Domokrasi Indonesia (IDI) Sulut	68 (dari skala 0 sampai 100)	69 (dari skala 0 sampai 100)	317.000.000	70 (dari skala 0 sampai 100)	252.375.000	71 (dari skala 0 sampai 100)	865.075.000	72 (dari skala 0 sampai 100)	1.198.084.130	73 (dari skala 0 sampai 100)	1.317.892.543	73 (dari skala 0 sampai 100)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam				30.000.000		-		-		-		100.000.000		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					2.650.000.000		2.065.000.000		5.665.000.000		5.116.232.000		5.927.855.200		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					5.380.289.000		6.229.290.000		5.281.807.671		6.687.620.000		8.093.432.329		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	573.691.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	581.325.300	Tidak ada pengaduan masyarakat	730.127.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	455.099.300	Tidak ada pengaduan masyarakat	772.225.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Satuan Polisi Pamong Praja ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	828.263.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	911.238.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	749.464.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	559.178.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	746.460.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%	84.150.000	100%	140.000.000	100%	115.860.000	100%	206.310.000	100%	285.500.000	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	125.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	177.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	204.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	59.721.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	274.652.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/ tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	44.500.000	100%	22.000.000	100%	18.516.000	100%	103.144.600	100%	118.616.100	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah demonstrasi	60 kali	12 kali	1.410.585.000	12 kali	1.643.136.000	6 kali	1.962.039.100	12 kali	3.208.183.100	12 kali	4.812.274.600	54 kali	Satuan Polisi Pamong Praja
		Prosentase laporan mengenai gangguan ketenteraman dan ketertiban yang direspon dalam waktu kurang dari 6 (enam) jam setelah laporan atau informasi diterima	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat disiplin PNS meningkat; prosentase PNS tidak disiplin yang terjaring razia / sidak	2,1%	3,1%		2,8%		2,6%		2,4%		2,3%		2,1%	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Program Pemeliharaan Kanranitibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio jumlah polisi PP/10.000 penduduk	2	4	170.810.000	4	135.430.000	4	460.392.500	3	489.949.500	2	811.556.500	2	Satuan Polisi Pamong Praja
		Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun / 1.000 populasi	60	12		12		6		12		12		54	Satuan Polisi Pamong Praja
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan keamanan	Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun / 1.000 populasi	60	12	96.000.000	12	-	6	-	12	-	12	100.000.000	54	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah demonstrasi	60	12		12		6		12		12		54	Satuan Polisi Pamong Praja

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1 20	2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	3 Jumlah laporan kasus pelanggaran penyakit masyarakat ke Satpol PP	4 12	5 -	6 -	7 3	8 39.870.000	9 3	10 59.100.800	11 3	12 60.806.900	13 3	14 136.500.000	15 12	16 Satuan Polisi Pamong Praja
		Prosentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	100%			100%		100%		100%		100%		100%	Satuan Polisi Pamong Praja
					3.333.000.000		3.650.000.000		4.300.000.000		5.142.393.000		8.057.785.500		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB SEKRETARIAT DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					54.918.882.000		53.025.195.250		53.317.159.789		90.394.280.000		90.394.280.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	79.493.971.550	Tidak ada pengaduan masyarakat	55.584.495.170	Tidak ada pengaduan masyarakat	67.425.429.452	Tidak ada pengaduan masyarakat	30.549.403.248	Tidak ada pengaduan masyarakat	40.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Daerah : Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	47.826.577.150	Tidak ada pengaduan masyarakat	45.040.018.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	63.808.886.375	Tidak ada pengaduan masyarakat	62.921.022.149	Tidak ada pengaduan masyarakat	80.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Sekretariat Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Sekretariat Daerah	100%	100%	3.974.404.950	100%	2.368.999.900	100%	2.839.962.601	100%	2.463.724.129	100%	3.500.000.000	100%	Sekretariat Daerah
4	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	-			-		-		-		-				Sekretariat Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.386.515.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.623.294.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.865.025.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.073.557.238	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			953.572.500		640.422.400		3.097.883.968		1.715.510.288		2.100.000.000		Sekretariat Daerah
7	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan				-		-		3.071.700.000		876.300.000		1.200.000.000		Sekretariat Daerah
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi	100 KK	100 KK	68.585.000		-		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan melalui Job Fair	20% (dari yang terdaftar)	20% (dari yang terdaftar)	62.875.000		-		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat Pencapaian Kinerja pemerintah dalam EKPD		70%	7.577.000.000	75%	6.240.000.000	75%	25.832.730.725	80%	30.632.333.398	80%	40.000.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Transmigrasi Lokal	cakupan peserta program transmigrasi yang mendapatkan pelayanan sosialisasi program transmigrasi	100 KK	100 KK	54.445.000		-		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti	2	2	20.000.000		-		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pengelolaan/penatausahaan keuangan, administrasi dan dokumen aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	10.322.650.000	100%	145.303.100	100%	2.754.930.000	100%	107.625.000		120.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/ Kota	Peningkatan opini badan pemeriksan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		2.045.000.000		-		-		-		120.000.000		Sekretariat Daerah	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun / 1.000 populasi	60	175.000.000	12	175.000.000		-		-		130.000.000		Sekretariat Daerah	
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah demonstrasi	60	12		12									
		% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	53,1%	55,0%	52.507.000		-		-		-		200.000.000		Sekretariat Daerah
		% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	62,26%	67,0%											
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Review RPJPD Provinsi Sulawesi Utara			110.825.000		-		-		105.300.000			Sekretariat Daerah	
		Midterm Review RPJMD Provinsi Sulawesi Utara													
		Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2020													
		Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													
		Tersusunnya KUA/PPAS Provinsi Sulawesi Utara													
22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan opini badan pemeriksan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	519.937.000	5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	454.954.000	5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	1.048.142.000	5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	817.602.000	5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	800.000.000	5 kab WDP 2 kab/kota WTP Prov Sulut WTP	Sekretariat Daerah
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan sistem informasi kebencanaan			20.000.000		-		-		-		80.000.000		Sekretariat Daerah
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentasi pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SAMSAT online	80%	100%	4.835.694.500	100%	3.589.800.300	100%	11.591.594.904	100%	7.098.039.300	100%	5.000.000.000	100%	Sekretariat Daerah
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah		3	1.540.957.000	3	524.168.500	6	492.161.600		1.293.124.950		1.300.000.000		Sekretariat Daerah
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan produk hukum daerah yang mendapatkan registrasi		60%	3.181.740.000	70%	3.264.257.450	75%	2.141.505.130	75%	1.703.692.000	75%	1.800.000.000		Sekretariat Daerah
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru				399.335.000		416.335.000		1.135.100.000		1.054.100.000		1.500.000.000		Sekretariat Daerah
28	Program Peningkatan Pengembangan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah		7%	2.407.850.000		-		-		-		600.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kemitraan Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi daerah			-	7%	1.595.788.000	7%	1.444.475.400		-		600.000.000		Sekretariat Daerah
29	Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas				341.398.000		478.125.000		321.099.000		430.136.600		500.000.000		Sekretariat Daerah
30	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah				33.830.000		30.000.000		60.000.000		67.350.000		80.000.000		Sekretariat Daerah
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur penyelenggara diklat yang tersertifikasi			263.908.950		321.556.180	70	373.087.850	80	410.600.000	90	500.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah program / rumpun diklat yang terlaksana dalam rangka pengembangan pola karir aparatur		364.252.500	446.015.650	597.019.700	440.494.000	500.000.000						Sekretariat Daerah	
37	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi SDA			196.375.000	195.800.000	233.327.000	36.500.000	50.000.000						Sekretariat Daerah	
38	Program Peningkatan Ketatatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi			180.005.400	270.686.150	320.025.350	244.620.000	300.000.000						Sekretariat Daerah	
39	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah peraturan/ sosialisasi kebijakan kualitas hidup anak dan perempuan	2 sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak	133.375.000	104.038.500	-	-	300.000.000						Sekretariat Daerah	
40	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu		-	50%	10.457.500	-	200.000.000						Sekretariat Daerah	
41	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		-	50%	16.932.500	-	100.000.000						Sekretariat Daerah	
42	Program Keluarga Berencana	Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana		.50%	121.875.000	.50%	105.571.500	-	-	100.000.000				Sekretariat Daerah	
43	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentasi anak usia 15 tahun keatas mendapat pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		-	.50%	13.000.000	-	100.000.000						Sekretariat Daerah	
45	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Prosentase masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan masyarakat	1	51.000.000	-	-	100.000.000							Sekretariat Daerah	
49	Program Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan sumberdaya Mineral	Meningkatnya potensi pemanfaatan energi sumber daya mineral (cakupan koordinasi dengan kab/kota yang terkait dengan sumber daya energi dan mineral)	7 kab/ kota	10 kab/ kota	250.492.000	10 kab/ kota	242.163.000	12 kab/ kota	290.271.000	12 kab/ kota	217.646.100	15 kab/ kota	350.000.000	15 kab/ kota	Sekretariat Daerah
50	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	97	101	83.500.000	103	145.637.000	105	100.190.000	105	138.650.800	106	200.000.000	106	Sekretariat Daerah
		Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	15.000		125.000		135.000		140.000		155.000		155.000	
51	Program Pembinaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	97	101	98.750.000	103	-	105	118.667.000	105	86.253.800	106	100.000.000	106	Sekretariat Daerah
		Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	15.000		125.000		135.000		140.000		155.000		155.000	
53	Program Penanggulangan Degradasi Lingkungan Perairan Kelautan dan Perikanan	Cakupan koordinasi penanggulangan degradasi lingkungan perairan kelautan dan perikanan	7 kab/ kota		-	7 kab/ kota	50.240.000		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
54	Program Penataan Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan koordinasi penataan tata ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil	5 kab/ kota	5 kab/ kota	55.500.000		-		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	% Kab/Kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman		15 kabupaten/kota	47.993.000	15 kabupaten/kota	50.055.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
		% penduduk >15 menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS		.40%		.40%									
56	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah/ Lembaga Keagamaan	Cakupan kerjasama antar pemerintah daerah		2 kerjasama	20.000.000	2 kerjasama (Teluk Tomini dan Jalur kereta api)	28.050.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
57	Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan		100%	50.000.000	100%	444.600.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
58	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tokoh Agama se Kabupaten/ Kota	Jumlah Masalah/ kejadian terkait ketahanan bangsa yang ditindaklanjuti		2	74.000.000	2	32.702.000			-	-		150.000.000		Sekretariat Daerah
59	Program Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Pemuda				49.000.000		135.997.000			-	-		150.000.000		Sekretariat Daerah
60	Program Penyuluhan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Bahaya Narkoba				46.430.000		40.952.000						150.000.000		Sekretariat Daerah
61	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Cakupan sistem informasi kebencanaan			-	2 daerah	20.000.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
62	Program Koordinasi Bimbingan Tata Cara Ibadah Haji				-		263.849.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
69	Program Penunjang Pelaksanaan pembangunan strategis dan Aspiratif				192.581.000		-			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
71	Program Koordinasi Pengelolaan Keragaman Budaya				285.000.000		142.815.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
72	Program Koordinasi Perlindungan dan Perkembangan Lembaga Ketenagakerjaan				62.875.000		-			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
73	Program Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Ketenagakerjaan	Menurunnya angka pengangguran			-		115.000.000			-	-	7%	100.000.000		Sekretariat Daerah
76	Program Koordinasi Pelayanan Bersedekah Kepada Umat/ Jamaah				49.750.000		-			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
77	Program Koordinasi Bimbingan Tata Cara Ibadah Haji				59.167.500		-			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah
79	Program Koordinasi Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan	Cakupan koordinasi potensi sumberdaya kehutanan, perikanan, perkebunan dan pertanian (Kab/kota)	5 kab/kota	15 kab/kota	205.000.000	15 kab/kota	440.194.000	15 kab/kota	541.559.000	15 kab/kota	245.296.900	15 kab/kota	100.000.000		Sekretariat Daerah
80	Program Koordinasi Sumberdaya Pertanian	Cakupan koordinasi potensi sumberdaya kehutanan, perikanan, perkebunan dan pertanian (Kab/kota)	5 kab/kota	15 kab/kota	260.000.000	15 kab/kota	256.133.000	15 kab/kota	244.621.000	15 kab/kota	177.826.400	15 kab/kota	175.000.000		Sekretariat Daerah
82	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				-		33.665.000			-	-		100.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	Program Koordinasi, Konsultasi Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Olahraga				55.000.000		44.185.000		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
84	Program Penataan Administrasi Kependudukan				214.500.000		208.100.000		167.700.000		118.200.000		100.000.000		Sekretariat Daerah
87	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah				-		72.939.000		67.500.000		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Pendidikan non formal				-		13.000.000		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
88	Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				-		30.000.000		-		-		200.000.000		Sekretariat Daerah
89	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% Penduduk Yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			-	66,0%	53.280.000		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
		% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat				69,0%									
92	Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				-		-		-		1.462.739.250		2.000.000.000		Sekretariat Daerah
96	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan				-		208.864.500		-		-		300.000.000		Sekretariat Daerah
97	Program Pengembangan Dan Keresatrasian Kebijakan Pemuda	Cakupan wilayah pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda			-	5 Kab/kota	13.000.000		-		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
101	Program Fasilitasi dan Pemasaran Produksi Daerah				-		-		90.320.000		-		250.000.000		Sekretariat Daerah
102	Program Fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan, Transportasi dan Perhubungan, dan Pariwisata				-		-		606.005.700		331.882.415		400.000.000		Sekretariat Daerah
103	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	Cakupan wilayah sinkronisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda			-		-	5kab/kota	1.495.000.000	5 kab/kota	1.200.000.000		1.600.000.000		Sekretariat Daerah
104	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan				-		-		353.876.000		323.775.650		400.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
105	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Cakupan Koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana			-		-		500.000.000	15 kab/kota	400.000.000	15 kab/kota	500.000.000		Sekretariat Daerah
106	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja				-		-		372.766.300		578.284.400		600.000.000		Sekretariat Daerah
107	Program Penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi				-		-		686.500.000		-		100.000.000		Sekretariat Daerah
108	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitas Sosial, Keagamaan dan Urusan Haji				-		-		4.399.300.000		7.228.360.000		8.000.000.000		Sekretariat Daerah
109	Program Pembinaan dan fasilitas Kemasyarakatan				-		-		315.000.000		245.000.000		300.000.000		Sekretariat Daerah
114	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara			-		-		-	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	6.320.308.000		7.000.000.000		Sekretariat Daerah
124	Program Peningkatan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Semua Peraturan Perundang-undangan				-		-		1.378.300.000		881.370.000		1.100.000.000		Sekretariat Daerah
125	Program Peningkatan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia				-		-		544.550.000		435.831.000		600.000.000		Sekretariat Daerah
126	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat				-		-		252.954.000		133.634.700		200.000.000		Sekretariat Daerah
127	Program Fasilitas Pelayanan Umum Administrasi Pimpinan				-		-		2.066.751.550		2.245.960.000		3.000.000.000		Sekretariat Daerah
129	Program Peningkatan/ Pengembangan Sani dan Telekomunikasi				-		-		404.692.008		501.034.818		750.000.000		Sekretariat Daerah
130	Program Pelayanan Umum Keprotokoleran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)			-		-		506.582.400		1.397.929.972		2.000.000.000		Sekretariat Daerah
131	Program Pelayanan Umum Rumah Tangga				-		-		774.517.012		2.142.614.968		5.000.000.000		Sekretariat Daerah
132	Program Peningkatan Kinerja Ekonomi Makro Daerah, serta Investasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Pemerintah Daerah				-		-		-		446.694.795		600.000.000		Sekretariat Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	Program Pembinaan Kelembagaan Usaha, BUMN/ BUMD, dan Perbankan				-		-		-		176.570.630		200.000.000		Sekretariat Daerah
134	Program Fasilitas, Peningkatan, dan Pemasaran Produksi Daerah				-		-		-		213.380.200		300.000.000		Sekretariat Daerah
135	Program Pembinaan Sarana Produksi Daerah dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi				-		-		-		86.779.300		90.000.000		Sekretariat Daerah
141	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekda/ Keasistenan				-		-		-		4.705.748.602		5.000.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Kerjasama Pembangunan												500.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu												700.000.000		Sekretariat Daerah
	Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik												635.973.480		Sekretariat Daerah
	Program peningkatan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja												602.000.000		
					170.875.000.000		126.740.440.000		206.731.709.025		176.482.807.000		230.582.973.480		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					3.352.125.000		3.828.110.000		3.043.027.923		3.798.980.000		3.798.980.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BPM-PD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BPM-PD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	429.061.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	427.106.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	455.270.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	738.625.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	903.625.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BPM-PD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BPM-PD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	184.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	574.100.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	482.270.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	245.110.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	366.080.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS BPM-PD yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di BPM-PD	100%	100%	70.000.000	100%	15.050.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	20.000.000	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja BPM-PD	-	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	59.920.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	337.610.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	337.610.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	9 laporan 100%	9 laporan 100%	24.000.000	9 laporan 100%	27.500.000	9 laporan 100%	69.900.000	9 laporan 100%	140.347.000	9 laporan 100%	140.347.000	9 laporan 100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7	Program penyelenggaraan hari besar Kenegaraan/Kedaerahan	Cakupan informasi pemberdayaan masy melalui pameran promosi : jumlah meteri yang dipamerkan	-	-	-	-	-	1 kegiatan 100%	30.500.000	1 kegiatan 100%	32.000.000	1 kegiatan 100%	35.000.000	1 kegiatan 100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	14,44% (Dari jumlah 1733 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	14,44% (Dari jumlah 1733 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	987.818.000	14,44% (Dari jumlah 1733 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	495.394.000	14,80 % (Dari jumlah 1777 Desa/ kel/ 12 Desa/Kel terbaik x 100%)	850.409.000	15,22 % (Dari Jumlah 1827 Desa/Kel terdiri dari 1495 desa 332 kel / 12 Desa/Kel x 100%)	849.142.000	15,22 % (Dari Jumlah 1827 Desa/Kel terdiri dari 1495 desa 332 kel / 12 Desa/Kel x 100%)	1.059.899.000	15,22 % (Dari Jumlah 1827 Desa/Kel terdiri dari 1495 desa 332 kel / 12 Desa/Kel x 100%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16	Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Proporsi desa yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif	47 % dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	47 % dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	129.578.000	47% dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	146.500.000	47% dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	109.250.000	47 % dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	114.252.000	47% dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	155.000.000	47% dari 241/503(dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan lembaga Bumdes aktif dibagi total	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
17	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	0,71 % dari 10/1401X100% (Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1401 desa tahun 2010 x 100%)	0,71 % dari 10/1401X100% (Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1401 desa tahun 2011 x 100%)	182.245.000	0,71 % dari 10/1401X100% (Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1401 desa tahun 2012 x 100%)	191.500.000	0,69. % dari 10/1445X100% (Dari 159 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1445 desa tahun 2013 x 100%)	962.310.000	0,69. % dari 10/1495X100% (Dari 162 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1495 desa tahun 2014 x 100%)	1.589.355.400	0,69 % dari 10/1495X100% (Dari 162 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1495 desa tahun 2015 x 100%)	1.272.550.000	0,69 % 10/1495X100% (Dari 162 Kecamatan yang terdiri dari 10 desa dibagi jumlah 1495 desa tahun 2015 x 100%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Proporsi aparatur pemerintah desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang administrasi desa	35% (dari Jumlah KaDes 1401 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	43% (dari Jumlah KaDes 1733 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	173.705.000	43% (dari Jumlah KaDes 1733 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	183.750.000	44% (dari Jumlah KaDes 1777 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	260.851.000	37% (dari Jumlah KaDes 1495 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	243.232.000	37% (dari Jumlah KaDes 1495 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	265.817.000	37% (dari Jumlah KaDes 1495 / jumlah aparatur yg dilatih 40 org tahun 2010 1/ x 100%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Proporsi desa/kelurahan yang mempunyai kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	219.592.200	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	172.000.000	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	378.950.000	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	348.215.000	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	348.215.000	57% dari 92/159 (klompok desa/kel dihitung dari jumlah desa yg memiliki kelompok kerja pemberdayaan perempuan aktif dibagi total 92/159)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
20	Program Nasional pemberdayaan masyarakat	Proporsi desa/kelurahan yang dapat melaksanakan pembangunan dengan swadaya murni masyarakat desa/kelurahan	2,42% (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec / 70 PJO yg dilatih x 100%) <i>apa jlh kec,desa sasaran atau total kec,desa se prov sulut</i>	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec x 100 yang dilatih x 100%) <i>apa target estimasi atau target sesuai realisasi DPA</i>	1.000.000.000	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	902.100.000	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	823.600.000	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	1.000.000.000	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	1.000.000.000	1,7 % (Dari Jumlah 170 PJO Kab/Kec /100 PJO yg dilatih x 100%)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
21	Program Peningkatan pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan diseminasi desa percontohan	-	-	-	-	-	-	148.770.000	2 desa	95.856.000	2 desa	95.856.000	2 desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					3.400.000.000		3.135.000.000		4.650.000.000		5.751.745.000		6.000.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS SOSIAL														
BELANJA	TIDAK LANGSUNG														
	Belanja Pegawai				8.263.105.000		9.410.400.000		7.760.879.000		9.740.640.000		9.740.640.000		Dinas Sosial
BELANJA	LANGSUNG														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Sosial ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Sosial	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	688.015.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	654.720.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.307.613.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.227.931.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.112.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Sosial
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Sosial ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Sosial	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	526.790.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.213.255.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.034.195.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.363.846.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.450.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Sosial
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Sosial yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Sosial	100%	100%	36.000.000	100%	31.250.000	100%	108.090.000	100%	36.800.000	100%	50.000.000	100%	Dinas Sosial
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Sosial	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.000.000	-	-	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	10.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Sosial
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	-	7 Lap	5.000.000	-	-	12 Lap	52.675.000	14 Lap	75.247.500	14 Lap	75.000.000	14 Lap	Dinas Sosial
	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan												100.000.000		
14	Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan, perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	11%	16%	311.300.000	17%	140.000.000	19%	644.440.000	15%	487.895.250	22%	945.000.000	22%	Dinas Sosial
15	Program Pemberdayaan fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial	-	13%	1.196.292.000	31%	2.250.000.000	71%	4.868.805.000	58%	2.759.262.500	19%	3.201.000.000	19%	Dinas Sosial

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		7%	340.400.000	16%	405.000.000	26%	1.281.300.000	12%	844.777.250	22%	1.510.000.000	22%	Dinas Sosial
17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatnya fungsi sosial PMKS Anak Terlantar melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan pelatihan ketrampilan; Persentase Anak Terlantar yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan pelatihan ketrampilan	16.67%	16.67%	326.600.000	16.67%	371.250.000	16.67%	527.500.000	16.67%	454.485.000	16.67%	800.000.000	16.67%	Dinas Sosial
18	Program Pembinaan Para penyandang cacat dan Trauma	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penyandang cacat dan trauma melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penyandang cacat dan trauma yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	-	56%	100.600.000	20%	373.000.000	100% eks kusta	264.625.000	100% eks kusta	209.055.000	20%	242.000.000	20%	Dinas Sosial
19	Program pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100%	100%	627.753.000	100%	440.025.000	100%	666.355.000	100%	1.382.959.000	100%	850.000.000	100%	Dinas Sosial
20	Program Pembinaan Eks penyandang penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Meningkatnya fungsi sosial PMKS Eks penyandang penyakit sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	-	-	2.500.000	10%	50.000.000	25%	350.000.000	20%	191.902.500	25%	190.000.000	25%	Dinas Sosial

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya fungsi PSKS dalam penyelenggaraan kesos melalui pelayanan dan pemberdayaan; Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan sosial	13%	3%	103.750.000	16%	190.000.000	19%	494.401.000	16%	450.407.500	13%	565.000.000	13%	Dinas Sosial
					4.270.000.000		6.118.500.000		12.600.000.000		10.484.569.000		11.100.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				11.233.485.000		10.719.855.000		10.836.121.307		13.597.930.000		14.957.723.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Disbudpar, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Disbudpar	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	863.720.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.010.614.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.325.211.492	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.233.438.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	708.417.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Disbudpar, Politik dan Perlindungan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Disbudpar	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	647.176.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.604.858.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	13.219.592.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	7.180.269.806	Tidak ada pengaduan masyarakat	8.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Disbudpar yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Disbudpar	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	55.250.000	100%	45.000.000	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Disbudpar	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	50.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	12.000.000	0	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	15.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	0%	100%	62.176.000	100%	50.864.000	100%	150.500.000	100%	90.034.250	100%	117.200.000	keakuratan laporan dan tercapainya kinerja disbudpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan informasi potensi kebudayaan dan pariwisata melalui pameran promosi di dalam dan luar negeri dan fasilitasi kegiatan MICE	0%	100%	2.589.115.500	100%	5.238.028.500	100%	4.461.041.500	100%	3.373.496.700	100%	5.685.000.000	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Proporsi objek wisata kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan serta keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan	0%	100%	723.137.500	100%	2.187.000.000	100%	5.655.089.658	100%	8.031.230.000	100%	9.277.012.000	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam menerapkan sadar wisata	0%	100%	310.750.000	100%	252.000.000	100%	642.356.750	100%	453.700.000	100%	550.000.000	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Partisipasi masyarakat dalam melestarikan kekayaan budaya daerah	0%	100%	414.450.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian Budaya sebagai daya tarik wisata dengan melibatkan generasi muda serta tokoh masyarakat	0%	100%	494.000.000	100%	662.100.000	100%	826.189.000	100%	2.063.111.000	100%	3.634.500.000	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah seniman, dan potensi seni, serta jumlah kreasi yang dapat dipentaskan	0%	100%	1.330.475.000	100%	1.520.535.000	100%	14.005.273.600	100%	6.732.961.050	100%	8.973.282.550	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatnya kreatifitas para seniman maupun apresiasi masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	0%	100%	-	0%	-	100%	39.150.000	0%	-	100%		100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					7.475.000.000		12.616.000.000		40.381.404.800		29.213.491.006		37.105.411.550		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	URUSAN WAJIB														
	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					6.418.825.000		7.468.920.000		6.483.509.000		8.080.790.000		8.888.869.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	467.260.350	Tidak ada pengaduan masyarakat	322.135.850	Tidak ada pengaduan masyarakat	433.190.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	379.980.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	417.978.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	407.270.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	429.162.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.661.980.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	476.052.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	523.657.750	Tidak ada pengaduan masyarakat	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	100%	100%	52.200.000	100%	40.000.000	100%	39.200.000	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			-		-		-		-		100.000.000		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			33.000.000		27.000.000		19.000.000		33.621.000		36.983.100		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan				-		-		-		53.053.000		58.358.300		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tersedianya Sistem Administrasi Kearsipan		5000 arsip	99.109.650	5000 arsip	9.653.150	5000 arsip	10.000.000	5000 arsip	174.280.200	6000 arsip	15.445.000	6000 arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah		5000 books	37.931.000	5000 books	37.118.000	5000 books	64.201.000	5000 books	91.964.000	5000 books	29.144.800	5000 books	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
17	Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya arsip daerah		5000 books	27.816.250	5000 books	27.816.250	5000 books	17.850.000	5000 books	65.620.000	5000 books	47.712.500	5000 books	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terlaksananya penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip daerah		15 paket	48.688.000	15 paket	1.544.253.000	15 paket	109.330.000	15 paket	53.855.000	15 paket	59.240.500	15 paket	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan				2.566.724.750		1.812.861.750		1.645.249.000		474.035.300		521.438.830		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
					3.740.000.000		4.250.000.000		4.000.000.000		1.867.461.000		1.881.458.780		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				5.417.979.000		6.090.010.000		5.488.137.464		6.882.900.000		7.571.190.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BPBD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BPBD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.221.061.376	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.482.210.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.233.571.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.278.889.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.949.740.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik BPBD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik BPBD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	748.588.624	Tidak ada pengaduan masyarakat	856.246.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	859.450.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	719.258.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	30.280.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS BPBD yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di BPBD	100%	100%	68.500.000	100%	59.500.000	100%	73.950.000	100%	59.000.000	100%	228.000.000	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja BPBD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	70.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	30.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan tahunan sesuai peraturan perundangan	-	15 laporan 100%	119.000.000	15 laporan 100%	50.500.000	15 laporan 100%	36.000.000	59 laporan 100%	297.884.600	71 laporan 100%	472.000.000	71 laporan 100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan sistem informasi kebencanaan	-	-	-	2 daerah	87.500.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Program Pemulihan Daerah Bencana	Cakupan pemulihan daerah bencana	-	1 daerah rawan bencana	157.000.000	1 daerah rawan bencana	187.800.000	2 daerah rawan bencana	403.516.500	1 daerah rawan bencana	281.969.400	3 daerah rawan bencana	12.404.000.000	3 daerah rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Cakupan penyebarluasan informasi di daerah rawan bencana	-	-	-	2 kegiatan	69.500.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Program Pengurangan Resiko Bencana	Cakupan Daerah Resiko Bencana Tinggi	-	5 daerah	2.001.560.000	2 daerah	553.660.000	4 daerah	1.081.165.400	3 daerah	200.106.800	3 daerah	2.287.500.000	3 daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat	Cakupan Kalompok Masyarakat Siaga Bencana	-	5 pokmas	591.240.000	3 pokmas	331.224.000	9 pokmas	900.317.200	2 pokmas	288.994.250	3 pokmas	1.685.000.000	3 pokmas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	Program Penanganan Darurat	Prosentase kabupaten diberikan bantuan bagi korban bencana	-	20% (SPM sesuai Permensos 129/HUK/2008)	310.900.000	20%	260.156.000	20%	789.212.600	20%	464.140.500	20%	3.770.000.000	20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Cakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Tersedia	-	3 sarpras	162.150.000	3 sarpras	181.704.000	3 sarpras	187.156.500	-	-	7 sarpras	4.750.000.000	7 sarpras	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	Tersusunnya perencanaan penanggulangan bencana terpadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.000.000.000	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah bimtek/pelatihan kapasitas penanggulangan bencana terpadu	-	-	-	-	-	3 kegiatan	200.000.000	4 kegiatan	394.253.250	5 kegiatan	3.337.000.000	5 kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Cakupan daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	2 daerah rawan bencana	85.660.000	3 daerah	147.518.000	5 daerah	490.000.000	5 daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Cakupan daerah pengembangan budaya sadar bencana	-	-	-	-	-	1 daerah	50.000.000	2 daerah	13.878.000	5 daerah	1.725.000.000	5 daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	Program Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pengendalian dan operasional penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 kegiatan	50.000.000	3 kegiatan	93.784.000	5 kegiatan	850.000.000	5 kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					5.450.000.000		4.150.000.000		5.950.000.000		4.239.677.000		69.478.740.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				1.069.099.000		1.077.523.000		1.228.103.795		1.554.910.000		1.710.401.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu : Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	155.400.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	213.152.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	356.106.500	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	439.869.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	540.000.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	KPPT Prov. Sulut
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu : Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	140.709.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	502.450.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	1.003.787.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	4.282.039.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	3.926.000.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	KPPT Prov. Sulut
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	7.350.000	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	65.000.000	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	10.500.000	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	18.200.000	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	30.000.000	100% (...PNS KPPT tidak mendapat teguran)	KPPT Prov. Sulut
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	2.500.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	2.500.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	-	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	18.940.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	37.000.000	0 (Tidak ada Pengaduan Masyarakat)	KPPT Prov. Sulut
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	25.140.500	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	21.240.500	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	27.275.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	25.000.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	42.000.000	100% (...laporan dari ...total laporan yang harus dilaporkan pada tahun berkenaan)	KPPT Prov. Sulut
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Berkembangnya kemitraan, kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran)	-	-	-	-	-	1 kali dalam setahun	12.964.500	1 kali dalam setahun	50.000.000	1 kali dalam setahun	25.000.000	1 kali dalam setahun	KPPT Prov. Sulut
15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Berkembangnya kemitraan, kerjasama investasi dan promosi daerah (tingkat partisipasi dan promosi pameran)	1 kali dalam setahun	1 kali dalam setahun	81.305.000	1 kali dalam setahun	27.000.000	1 kali dalam setahun	104.334.500	-	-	-	1.000.000.000	-	KPPT Prov. Sulut
16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya Jumlah Ijin dan non ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	507 Ijin	532 Ijin	166.250.000	558 Ijin	163.900.000	585 Ijin	228.054.500	-	-	-	600.000.000	-	KPPT Prov. Sulut
17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Prosentase pengelolaan ijin dan non ijin sesuai dengan SOP Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang da di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu)	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang da di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu)	71.345.500	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang da di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu)	54.757.500	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang da di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu)	78.978.000	100% (Ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang da di Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu)	8.500.000	-	200.000.000	-	KPPT Prov. Sulut
18	Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya Jumlah Ijin dan non ijin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perjinan Terpadu	-	-	-	-	-	-	-	614 Ijin	208.115.000	644 Ijin	400.000.000	644 Ijin	KPPT Prov. Sulut

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Prosentase pengelolaan ijin dan non ijin sesuai dengan SOP Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu								100% (ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)		100% (ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)		100% (ijin dan non ijin yang diproses sesuai dengan SOP yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)	KPPT Prov. Sulut
					650.000.000		1.050.000.000		1.822.000.000		5.050.663.000		6.800.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.20.4	SEKRETARIAT DPRD														
BELANJA	TIDAK LANGSUNG														
	Belanja Pegawai				6.252.012.000		6.106.685.000		6.581.514.000		7.650.790.000		7.650.790.000		
BELANJA	LANGSUNG														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat DPRD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat DPRD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.151.040.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.081.782.075	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.758.248.586	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.298.603.770	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.298.603.770	Tidak ada pengaduan masyarakat	Set. DPRD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat DPRD ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat DPRD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	8.837.475.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	10.029.506.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	27.943.725.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	44.149.012.240	Tidak ada pengaduan masyarakat	40.131.122.810	Tidak ada pengaduan masyarakat	Set. DPRD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Sekretariat DPRD yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Sekretariat DPRD	100%	100%	126.600.000	100%	133.875.000	100%	38.400.000	100%	139.050.000	100%	139.050.000	100%	Set. DPRD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	798.500.000	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	281.600.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	250.279.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	250.279.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Set. DPRD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	3	3	198.500.000	4	165.550.000	3	465.027.760	2	99.721.360	2	99.721.360	2	Set. DPRD
6	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Tertaksananya penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan (Kekutsertaan Sekretariat DPRD pada pameran pembangunan dalam rangka HUT Provinsi Sulut	-	-	-	-	-	-	-	1	137.800.000	1	137.800.000	1	Set. DPRD
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tertaksananya peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	11	11	33.487.885.000	13	29.066.646.325	12	27.491.756.814	14	23.251.461.940	14	24.751.461.940	14	Set. DPRD
8	Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD	Terciptanya Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD	-	-	-	3	2.019.407.200	3	3.021.241.840	3	5.514.648.690	3	5.514.648.690	3	Set. DPRD
					48.600.000.000		46.496.767.500		65.000.000.000		79.840.577.000		77.322.687.570		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB														
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				-		14.377.090.000		10.952.437.374		11.413.100.000		12.554.410.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	-	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.331.275.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	2.669.703.330	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	2.547.950.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	2.802.745.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	-	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.931.325.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	3.130.837.400	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.435.721.850	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.579.294.035	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	120.000.000	100%	103.850.000	100%	116.550.000	100%	128.205.000	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	-	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	246.000.000	-	-	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	197.500.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	217.250.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	-	-	-	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	229.000.000		507.109.270		356.860.000		392.546.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	-	-		9.828.300.000	-			-		100.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
18	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Peningkatan opini badan pemeriksaaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah	-	-	-	3 Kab/kota WDP	2.086.500.000		-		-		350.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
26	Program penataan peraturan perundang-undangan		-	-	-		105.000.000		-		-		200.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
33	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		-	-	-		122.600.000						175.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
110	Program penganggaran daerah	Tersedianya Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	-	-	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	2.633.500.000	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	2.557.962.000	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	2.813.758.200	1 (satu) Perda APBD dan 1 (satu) Pergub Penjabaran APBD Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
111	Program penataan regulasi keuangan dan barang milik daerah	Tersedianya regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Tersedianya regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	-	-	Tersedianya 8 (delapan) regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.295.600.000	Tersedianya 8 (delapan) regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.261.859.500	Tersedianya 8 (delapan) regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.388.045.450	Tersedianya 8 (delapan) regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
112	Program peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan barang milik daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Kompeten. (Jumlah bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan daerah)		-	-	5 Bimbingan teknis	523.700.000	5 Bimbingan teknis	1.056.036.300	5 Bimbingan teknis	1.161.639.930	5 Bimbingan teknis	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
113	Program pengelolaan belanja transfer			-	-		1.374.760.000		1.363.331.850		1.499.664.815		Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
114	Program pengelolaan barang milik daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara		-	-	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1.924.700.000	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1.735.500.000	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1.909.050.000	1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
115	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		-	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.375.000.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.290.000.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.519.000.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
116	Program pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		-	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.430.740.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.178.540.700	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	2.396.394.770	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
117	Program peningkatan akuntabilitas Pelaporan keuangan daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu.		-	-	1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu	1.409.500.000	1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu	1.514.900.000	1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu	1.666.390.000	1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yg tepat waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
		Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		-	-	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP		5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP		5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP		5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
118	Program peningkatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah SKPD	Tersajinya informasi keuangan dan barang milik daerah yang akurat		-	-	1 simda keuangan	936.000.000	1 simda keuangan	555.400.000	1 simda keuangan	610.940.000	1 simda keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
		Tersajinya informasi UAPPA/B-W yang akurat		-	-	1 simda barang		1 simda barang		1 simda barang		1 simda barang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
119	Program peningkatan pengelolaan investasi, hutang dan piutang daerah	Cakupan pelaksanaan Perda tentang Investasi, Hutang dan Piutang Daerah secara akurat		-	-	90%	185.000.000	90%	219.300.000	90%	241.230.000	90%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		
				-	16.000.000.000		21.500.000.000		19.387.412.000		22.151.153.200				

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	URUSAN WAJIB														
1.1.	DINAS PENDAPATAN DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				31.471.774.000		32.555.850.000		34.814.922.669		42.860.830.000		42.860.830.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pendapatan Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pendapatan Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.951.750.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.645.455.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.258.369.910	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.677.975.320	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.269.460.590	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pendapatan Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pendapatan Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.570.160.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.947.250.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	14.000.598.050	Tidak ada pengaduan masyarakat	12.060.092.020	Tidak ada pengaduan masyarakat	9.108.295.740	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Pendapatan Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pendapatan Daerah	100%	100%	125.750.000	100%	147.250.000	100%	183.410.000	100%	520.250.000	100%	251.000.000	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	220.900.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	129.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	355.045.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	173.132.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	86.566.250	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	16	16	406.450.000	16	716.170.000	16	1.927.123.050	16	1.458.038.660	16	1.802.839.610	16	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Prosentase capaian sosialisasi terhadap wajib pajak	-	-	-	-	-	-	-	100%	260.023.160	100%	80.023.160	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase pengelolaan/penatausahaan keuangan, administrasi dan dokumen aset sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	90%	100%	600.787.765	100%	446.200.000	100%	1.330.411.950	100%	1.607.954.850	100%	1.650.556.730	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Prosentasi pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan SAMSAT online	80%	100%	540.500.000	100%	594.500.000	100%	391.907.760	100%	1.248.889.000	100%	1.878.689.000	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase PNS Dinas Pendapatan Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pendapatan Daerah	90%	100%	124.590.000	100%	154.000.000	100%	249.337.000	100%	432.738.550	100%	391.423.550	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak sesuai target yg ditetapkan	100%	100%	3.849.435.000	100%	1.674.220.000	100%	8.613.415.080	100%	8.339.646.340	100%	11.389.029.540	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah **	Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	100%	794.130.000	100%	2.157.494.300	-	-	-	-	-	150.000.000	-	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11	Program penelitian dan pengembangan pendapatan daerah	Prosentase target penerimaan pendapatan daerah yang harus direalisasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	100%	100%	433.700.000	100%	296.600.000	100%	454.484.500	100%	803.875.700	100%	1.013.875.700	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
12	Program intensifikasi pengelolaan pajak daerah	Prosentase masyarakat Wajib Pajak yang membayar pajak dan melunasi piutang pajak	100%	100%	1.241.635.000	100%	1.281.500.000	100%	1.811.841.900	100%	1.249.729.000	100%	1.499.674.800	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Program ekstensifikasi sumber retribusi daerah		100%	100%	105.900.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
13	Program pengawasan pengelolaan pendapatan daerah, aset dan personil	Prosentase unit pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan penerimaan, penatausahaan anggaran belanja, aset/barang inventaris dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	248.100.000	100%	273.480.000	100%	333.475.500	100%	585.108.100	100%	700.000.000	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
14	Program optimalisasi pengelolaan dana perimbangan	Prosentase dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang diterima Provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota	100%	100%	506.212.235	100%	133.500.000	100%	187.199.200	100%	172.540.200	100%	190.000.000	100%	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
					16.720.000.000		17.596.619.300		35.096.619.300		33.589.993.400		36.561.434.670		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1	INSPEKTORAT														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				10.328.514.500		11.037.370.000		10.731.202.000		11.213.490.000		12.334.839.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Inspektorat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Inspektorat	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	762.081.445	Tidak ada pengaduan masyarakat	837.009.018	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.629.937.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	993.097.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.092.406.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	Inspektorat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Inspektorat ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Inspektorat	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.612.725.900	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.879.032.220	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.470.578.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.269.188.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.496.107.350	Tidak ada pengaduan masyarakat	Inspektorat
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Inspektorat yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Inspektorat	100%	100%	101.410.000	100%	39.150.000	100%	107.380.000	100%	54.000.000	100%	59.400.000	100%	Inspektorat
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat			-		-		-	Tidak ada pengaduan masyarakat	83.770.000		92.147.000		Inspektorat
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			163.253.845		158.102.416		237.548.000		255.493.000		281.042.300		Inspektorat
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	4.912.126.902	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	5.615.708.046	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	7.865.622.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	7.276.059.500	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	8.003.665.450	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	Inspektorat
21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan opini badan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah		5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	398.401.908	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	291.989.300	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	524.925.500	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	178.500.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	196.350.000	5 Kab/kota WDP, 2 Kab/Kota WTP, Provinsi Sulut WTP	Inspektorat
					7.950.000.000		8.820.991.000		11.835.991.000		11.110.108.000		12.221.118.800		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	URUSAN WAJIB BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					2.730.435.000		4.683.350.000		3.585.657.518		4.232.580.000		4.655.838.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Penghubung ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Penghubung	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.801.800.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.300.750.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.450.581.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.216.630.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.338.293.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Penghubung
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Penghubung ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Penghubung	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.627.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.217.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.899.934.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.363.400.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.499.740.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Penghubung
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Penghubung yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Penghubung	100%	100%	19.250.000	100%	22.750.000	100%	29.900.000	100%	32.000.000	100%	35.200.000	100%	Badan Penghubung
4	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS				20.000.000		60.000.000		40.000.000		20.000.000		22.000.000		Badan Penghubung
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung			-		-		-		-		-		Badan Penghubung
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			43.200.000		56.250.000		255.930.000		412.201.000		453.421.100		Badan Penghubung
15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (Orang)		12.000	178.250.000	15.000	179.250.000		-		-		300.000.000		Badan Penghubung
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			76.900.000		-		-		-		200.000.000		Badan Penghubung
25	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah Kerjasama antar pemerintah daerah		3	152.600.000	3	117.000.000	6	284.129.000		251.568.000		276.724.800		Badan Penghubung
32	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Penghubung	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	31.000.000		-		-		-		100.000.000		Badan Penghubung
98	Program peningkatan/ fasilitas bidang promosi dan informasi, pendekatan investasi dan keprotokoleran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung Pemprov Sulut di Jakarta)			-	Tidak ada pengaduan masyarakat	259.500.000		-		-		1.000.000.000		Badan Penghubung
99	Program pengelolaan dan pemeliharaan TMII dan asrama mahasiswa	Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara (orang)		12.000	-	15.000	387.000.000	17.000	457.896.000	17.500	428.825.000	18.000	471.707.500	18.000	Badan Penghubung
128	Program peningkatan/ fasilitas bidang promosi dan informasi budaya daerah	Jumlah kunjungan wisatawan ke TMII anjungan Sulawesi Utara			-		-	17.000	258.430.000	17.500	190.100.000	18.000	209.110.000	18.000	Badan Penghubung

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
130	Program pelayanan umum keprotokoleran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik (Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan publik Badan penghubung pemprov Sulut di Jakarta)			-		-	Tidak ada pengaduan masyarakat	823.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	834.000.000		917.400.000		Badan Penghubung
					4.950.000.000		4.600.000.000		7.500.000.000		4.748.724.000		6.823.596.400		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				3.225.300.000		3.748.880.000		3.222.402.924		4.040.900.000		4.040.900.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pengelola Perbatasan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pengelola Perbatasan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	475.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	513.025.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	731.055.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	427.197.940	Tidak ada pengaduan masyarakat	500.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pengelola Perbatasan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Pengelola Perbatasan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Pengelola Perbatasan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	852.097.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	515.850.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	765.250.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	425.524.760	Tidak ada pengaduan masyarakat	500.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Badan Pengelola Perbatasan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Badan Pengelola Perbatasan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Pengelola Perbatasan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	19.250.000	100%	50.750.000	100%	75.000.000	100%	Badan Pengelola Perbatasan
4	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS				-		-		-		-				Badan Pengelola Perbatasan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	23.320.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	10.000.000		-		-		50.000.000		Badan Pengelola Perbatasan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			18.750.000		12.300.000		99.180.000		99.135.000		100.000.000		Badan Pengelola Perbatasan
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			-		-		76.560.000		39.150.000		50.000.000		Badan Pengelola Perbatasan
46	Program pengembangan wilayah perbatasan	Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan (cakupan kec/desa yg mendapatkan informasi mengenai pengembangan wilayah perbatasan)		10	710.832.500	10	767.100.000		-		-		300.000.000		Badan Pengelola Perbatasan
86	Program pengembangan data/ informasi	Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan (cakupan kec/desa yg mendapatkan informasi mengenai pengembangan wilayah perbatasan)			-	10	261.725.000		-		-		200.000.000		Badan Pengelola Perbatasan
120	Program pengelolaan batas negara	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Batas Negara (Cakupan penyusunan dan monev program kerja pengelolaan batas negara, penanganan undocumented citizen WNI di Filipina)			-		-	1	263.370.000	1	297.984.000	5	1.452.500.000		Badan Pengelola Perbatasan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	Program kerjasama daerah perbatasan	Meningkatnya Kerjasama Pengelolaan Perbatasan (Cakupan kerjasama dengan K/L terkait, antar wilayah perbatasan, antar SKPD terkait, Costum, Imigration, Quarantine, Security, Perguruan Tinggi, OKP, LSM)			-		-	1	277.130.000	1	622.685.300	1	2.572.935.000		Badan Pengelola Perbatasan
122	Program pengelolaan infrastruktur kawasan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Kawasan Perbatasan (Cakupan koordinasi, sosialisasi, monev, pembangunan infrastruktur dasar wltas)			-		-	8	895.000.000	1	273.692.000	1	2.712.800.000		Badan Pengelola Perbatasan
123	Program pengelolaan potensi kawasan	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (Cakupan koordinasi penataan ruang, pemetaan, pengelolaan, dan promosi potensi kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar)			-		-	11	673.205.000	1	265.371.000	1	406.500.000		Badan Pengelola Perbatasan
					2.100.000.000		2.100.000.000		3.800.000.000		2.501.490.000		8.919.735.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.20.11.01	URUSAN WAJIB SEKRETARIAT KORPRI														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					1.608.390.000		1.870.920.000		1.408.089.000		1.750.180.000		1.750.180.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Korpri ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Korpri	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	350.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	394.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	466.963.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	181.120.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	329.860.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Korpri ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Korpri	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	490.900.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	698.100.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.018.625.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	141.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	620.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Sekretariat Korpri yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Sekretariat Korpri	100%	100%	59.100.000	100%	9.450.000	100%	192.100.000	100%	12.000.000	100%	25.000.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100%	100%	150.000.000	100%	33.001.500	100%	41.666.500	100%	14.450.000	100%	33.500.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Tertaksananya Program Pengembangan Nilai Budaya	-		-		-		-		-		200.000.000		Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tertaksananya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-		-		-		-		-		200.000.000		Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Tertaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-		-		-		-		-		200.000.000		Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
23	Program Peningkatan Fasilitas Sosial dan Keagamaan	Tertaksananya Program Peningkatan Fasilitas Sosial dan Keagamaan	-		-		-		-		-		200.000.000		Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
24	Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Terselenggaranya Program Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	-		-		-		-		-		200.000.000		Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tertaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100%	175.000.000	100%	117.100.000	100%	91.800.000	100%	84.642.000	100%	250.000.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
33	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tertaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-	-	100%	337.000.000	100%	407.365.000	100%	262.040.000	100%	330.000.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
57	Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	Tertaksananya Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	-	-	-	100%	82.548.500	100%	80.580.000	100%	101.400.000	100%	220.000.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
85	Program Pembinaan, Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Tertaksananya Program pembinaan Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	100%	100%	225.000.000	100%	1.328.800.000	100%	7.000.900.000	100%	102.740.000	100%	520.000.000	100%	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
**	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		100%	100%	168.053.000		-		-		-		300.000.000	-	Sekretariat KORPRI Prov. Sulut
					1.618.053.000		3.000.000.000		9.300.000.000		899.392.000		3.628.360.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					4.997.631.000		5.812.680.000		5.030.211.459		6.288.390.000		6.917.229.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pengaduan publik terhadap kinerja Badan Diklat	Tidak Pengaduan	Tidak Pengaduan	1.153.851.500	Tidak Pengaduan	1.549.271.500	Tidak Pengaduan	1.663.893.250	Tidak Pengaduan	1.869.336.700	Tidak Pengaduan	1.969.336.700	Tidak Pengaduan	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar akreditasi	50	60	6.007.430.000	65	2.884.906.000	70	2.953.173.450	72	3.499.387.000	75	7.212.935.050	75	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah teguran terhadap disiplin pegawai Badan Diklat	Tidak Ada teguran	Tidak Ada teguran	85.500.000	Tidak Ada teguran	32.000.000	Tidak Ada teguran	37.750.000	Tidak Ada teguran	83.600.000	Tidak Ada teguran	83.600.000	Tidak Ada teguran	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur penyelenggara diklat yang tersertifikasi	30	-	-	-	-	70	521.427.800	80	258.901.500	90	625.000.000	90	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	20	-	-	16	38.900.000	16	150.558.500	16	10.513.500	16	43.200.000	16	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi struktural, teknis dan fungsional	65	65	3.223.453.000	65	3.148.203.500	66	3.392.153.800	67	3.700.000.000	75	6.115.465.000	75	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
33	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah program / rumpun diklat yang terlaksana dalam rangka pengembangan pola karir aparatur	6	6	1.329.765.500	6	846.719.000	6	181.043.200	6	198.370.400	10	247.000.000	10	Badan Pendidikan Dan Pelatihan
					11.800.000.000		8.500.000.000		8.900.000.000		9.620.109.100		16.296.536.750		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					4.718.807.000		5.581.230.000		4.545.734.555		5.731.360.000		6.304.496.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	576.370.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.087.458.120	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.014.980.500	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	667.634.750	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	767.779.330	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	776.480.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	398.130.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	985.095.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.088.992.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	1.347.863.095	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS Badan Kepegawaian Daerah yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Badan Kepegawaian Daerah	100%	100%	76.000.000	100%	30.000.000	100%	44.200.000	100%	113.950.000	100%	102.522.500	100%	Badan Kepegawaian Daerah
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	226.000.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	138.483.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	596.420.500	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	467.927.000	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	538.116.050	Tidak Ada Pengaduan Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	-	16	-	114.884.420	16	188.000.000	16	191.895.000	16	241.456.300	16	Badan Kepegawaian Daerah	
33	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	cakupan kab/kota yg melaksanakan manajemen kepegawaian/ pola karir sesuai aturan	100% (15 Kab/kota)	100% (15 Kab/kota)	1.595.150.000	100% (15 Kab/kota)	2.368.544.460	100% (15 Kab/kota)	2.958.804.000	100% (15 Kab/kota)	293.110.600	100% (15 Kab/kota)	488.516.215	100% (15 Kab/kota)	Badan Kepegawaian Daerah
136	Program pengadaan dan pengembangan pegawai	Prosentase CPNS yang diangkat untuk memenuhi kebutuhan formasi (jumlah CPNS yang diangkat dibagi kebutuhan formasi sesuai dengan analisis kebutuhan)	90%	-	-	-	-	-	100%	787.801.400	100%	1.116.595.826	100%	Badan Kepegawaian Daerah	
		Prosentase peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur (jumlah PNS terkirim dalam Diklat dibanding jumlah PNS)	65%	-	-	-	-	65%	-	90%	-	90%	-	Badan Kepegawaian Daerah	
137	Program pengelolaan kenaikan pangkat, pembinaan dan pensiun	Prosentase PNS yg difasilitasi naik pangkat, pindah dan pensiun (keputusan jadi dibandingkan jumlah usulan kenaikan pangkat, pindah dan pensiun)	90%	-	-	-	-	-	90%	365.429.550	95%	441.186.461	95%	Badan Kepegawaian Daerah	
138	Program pengembangan data dan informasi kepegawaian	Prosentase Akurasi data dan informasi sebagai dukungan bahan pengambil kebijakan kepegawaian	80%	-	-	-	-	-	95%	309.211.000	98%	431.214.705	98%	Badan Kepegawaian Daerah	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
139	Program pengelolaan kesejahteraan pegawai	Cakupan PNS yg mendapatkan penghargaan satyalancana karyasatya	80%							80%	182.774.650	100%	210.190.848	100%	Badan Kepegawaian Daerah
		Cakupan PNS yg difasilitasi dalam hal BPJS, Bapertarum, Taspen	90%							100%					Badan Kepegawaian Daerah
140	Program pembinaan dan pengawasan aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	62 Kasus Pelanggaran disiplin PNS, 13 Pelanggaran Etika PNS							turun 15% dari tahun sebelumnya	666.931.050	turun 30% dari tahun sebelumnya	3.467.276.405	turun 20% dari tahun sebelumnya	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase aparatur daerah yang dinilai berdasarkan penilaian kinerja instansi dan pegawai	100%							100%		100%		100%	Badan Kepegawaian Daerah
					3.250.000.000		4.137.500.000		5.787.500.000		5.135.657.000		9.152.717.735		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai				16	1.331.631.000	20	1.637.750.000	22	1.042.466.344	27	1.306.450.000	35	2.000.000.000	35	Sekrt.KPID
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat dan Komisioner KPID ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat dan Komisioner KPID	Tidak ada Aduan	Tidak ada Aduan	237.735.000	Tidak ada aduan	177.500.000	Tidak ada aduan	258.074.700	Tidak ada aduan	184.786.100	Tidak ada aduan	390.000.000	Tidak ada aduan	Sekrt.KPID
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat dan Komisioner KPID ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat dan Komisioner KPID	Tidak ada Aduan	Tidak ada Aduan	79.450.000	Tidak ada Aduan	175.700.000	Tidak ada Aduan	346.837.500	Tidak ada Aduan	41.480.000	Tidak ada Aduan	1.035.000.000	Tidak ada Aduan	Sekrt.KPID
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Sekretariat dan Komisioner yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Sekretariat dan Komisioner	17 Orang	100% (dari 14 PNS)	9.600.000	100 % (dari 14 PNS)	8.800.000	94%(dari 18 PNS)	20.000.000	100% (dari 20 PNS)	16.250.000	100% (dari 35 PNS)	35.000.000	100% (dari 35 PNS)	Sekrt.KPID
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	19 Laporan	100% (dari 20 Lap)	28.590.000	100% (dari 21 Lap)	17.000.000	100% (dari 31 Lap)	11.500.000	100% (dari 31 Lap)	25.256.000	100% (dari 31 Lap)	105.000.000	100% (dari 31 Lap)	Sekrt.KPID
15	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan penyiaran (Menurunnya tingkat pelanggaran penyiaran dan aduan Masyarakat terhadap isi siaran)	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	47.940.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	8.000.000	-	-	-	-	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	70.000.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	Sekrt.KPID
18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan penyiaran (Menurunnya tingkat pelanggaran penyiaran dan aduan Masyarakat terhadap isi siaran)	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	606.000.000	-	-	-	-	-	-	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	75.000.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	Sekrt.KPID
20	Program Peningkatan Struktur Sistem Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan penyiaran (Menurunnya tingkat pelanggaran penyiaran dan aduan Masyarakat terhadap isi siaran)	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	90.685.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 15 %	713.000.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 15 %	863.587.800	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 15 %	753.232.950	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	1.570.000.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	Sekrt.KPID
21	Program peningkatan Peran Dan Fungsi Serta Penguatan kelembagaan KPID	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan penyiaran (Menurunnya tingkat pelanggaran penyiaran dan aduan Masyarakat terhadap isi siaran)	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 20 %	-	-	-	-	-	-	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 15 %	35.617.950	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	490.000.000	Prosentase pelanggaran isi siaran ditekan hingga 10 %	Sekrt.KPID
					1.100.000.000		1.100.000.000		1.500.000.000		1.056.623.000		3.770.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PILIHAN														
1.1.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				25.767.328.000		29.695.590.000		25.390.696.857		31.888.260.000		40.000.000.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.631.362.950	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.315.046.350	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.364.663.600	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.808.813.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.190.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pertanian dan Peternakan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Pertanian dan Peternakan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.474.436.050	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.525.029.350	Tidak ada pengaduan masyarakat	5.022.395.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.785.737.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.259.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Pertanian dan Peternakan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Pertanian dan Peternakan	100%	100%	243.100.000	100%	207.500.000	100%	188.150.000	100%	248.350.000	100%	257.700.000	100%	Dinas Pertanian dan Peternakan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	323.900.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	133.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	56.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	43.040.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	46.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Pertanian dan Peternakan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	-	-	109.950.000	-	172.445.000	-	160.368.000	-	88.432.500	-	75.000.000	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar daerah dan promosi/ kedaerahan	Pelaksanaan hari-hari besar daerah dan promosi (kali)	-	-	-	-	-	-	-	1	566.480.900	1	686.000.000	2	Dinas Pertanian dan Peternakan
15	Program peningkatan kesejahteraan petani	NTP	99%	99%	1.039.300.000	99%	763.950.000	99%	754.515.000	99%	1.512.417.097	99%	1.640.600.000	99%	Dinas Pertanian dan Peternakan
16	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 595.712, Jagung 448.375 Ton, Kedelai 7.665 Ton, Kacang Hijau 2.295 Ton, Kacang Tanah 9.018 Ton, Ubi Kayu 84.503 Ton, Ubi Jalar 52.097 Ton, Buah-Buahan 160.982 Ton, Sayuran 396.333 Ton, Bunga Potong 6.076.043 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 695.497 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 24.841 Kg, Tanaman Obat 3.368.181 Kg	4.635.522.000	Produksi Padi 613.583 Ton, Jagung 450.617 Ton, Kedelai 7.703 Ton, Kacang Hijau 2.206 Ton, Kacang Tanah 9.063 Ton, Ubi Kayu 84.926 Ton, Ubi Jalar 52.358 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 409.026 Ton, Bunga Potong 6.635.647 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 732.915 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 27.300 Kg, Tanaman Obat 3.501.735 Kg	3.452.215.500	Produksi Padi 631.990 Ton, Jagung 452.870 Ton, Kedelai 7.742 Ton, Kacang Hijau 2.217 Ton, Kacang Tanah 9.108 Ton, Ubi Kayu 85.351 Ton, Ubi Jalar 52.619 Ton, Buah-Buahan 179.875 Ton, Sayuran 422.131 Ton, Bunga Potong 7.246.790 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 772.346 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 30.003 Kg, Tanaman Obat 3.640.584 Kg	4.912.081.096	Produksi Padi 644.630 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.781 Ton, Kacang Hijau 2.228 Ton, Kacang Tanah 9.154 Ton, Ubi Kayu 85.777 Ton, Ubi Jalar 52.893 Ton, Buah-Buahan 190.142 Ton, Sayuran 435.662 Ton, Bunga Potong 7.914.219 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 813.898 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 32.973 Kg, Tanaman Obat 3.784.939 Kg	1.628.567.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	1.859.000.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 595.712, Jagung 448.375 Ton, Kedelai 7.665 Ton, Kacang Hijau 2.295 Ton, Kacang Tanah 9.018 Ton, Ubi Kayu 84.503 Ton, Ubi Jalar 52.097 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.076.043 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 695.497 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 24.841 Kg, Tanaman Obat 3.368.181 Kg	474.706.000	Produksi Padi 613.583 Ton, Jagung 450.617 Ton, Kedelai 7.703 Ton, Kacang Hijau 2.206 Ton, Kacang Tanah 9.063 Ton, Ubi Kayu 84.926 Ton, Ubi Jalar 52.358 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.635.647 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 732.915 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 27.300 Kg, Tanaman Obat 3.501.735 Kg	771.105.000	Produksi Padi 631.990 Ton, Jagung 452.870 Ton, Kedelai 7.742 Ton, Kacang Hijau 2.217 Ton, Kacang Tanah 9.108 Ton, Ubi Kayu 85.351 Ton, Ubi Jalar 52.619 Ton, Buah-Buahan 179.875 Ton, Sayuran 422.131 Ton, Bunga Potong 7.246.790 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 772.346 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 30.003 Kg, Tanaman Obat 3.640.584 Kg	626.075.000	Produksi Padi 644.630 Ton, Jagung 455.134 Ton, Kedelai 7.781 Ton, Kacang Hijau 2.228 Ton, Kacang Tanah 9.154 Ton, Ubi Kayu 85.777 Ton, Ubi Jalar 52.883 Ton, Buah-Buahan 190.142 Ton, Sayuran 435.662 Ton, Bunga Potong 7.914.219 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 813.898 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 32.973 Kg, Tanaman Obat 3.784.939 Kg	-	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	12.000.000.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 595.712, Jagung 448.375 Ton, Kedelai 7.665 Ton, Kacang Hijau 2.295 Ton, Kacang Tanah 9.018 Ton, Ubi Kayu 84.503 Ton, Ubi Jalar 52.097 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.076.043 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 695.497 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 24.841 Kg, Tanaman Obat 3.368.181 Kg	1.477.975.000	Produksi Padi 613.583 Ton, Jagung 450.617 Ton, Kedelai 7.703 Ton, Kacang Hijau 2.206 Ton, Kacang Tanah 9.063 Ton, Ubi Kayu 84.926 Ton, Ubi Jalar 52.358 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.635.647 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 732.915 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 27.300 Kg, Tanaman Obat 3.501.735 Kg	3.247.800.000	Produksi Padi 631.990 Ton, Jagung 452.870 Ton, Kedelai 7.742 Ton, Kacang Hijau 2.217 Ton, Kacang Tanah 9.108 Ton, Ubi Kayu 85.351 Ton, Ubi Jalar 52.619 Ton, Buah-Buahan 179.875 Ton, Sayuran 422.131 Ton, Bunga Potong 7.246.790 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 772.346 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 30.003 Kg, Tanaman Obat 3.640.584 Kg	13.230.722.014	Produksi Padi 644.630 Ton, Jagung 455.134 Ton, Kedelai 7.781 Ton, Kacang Hijau 2.228 Ton, Kacang Tanah 9.154 Ton, Ubi Kayu 85.777 Ton, Ubi Jalar 52.883 Ton, Buah-Buahan 190.142 Ton, Sayuran 435.662 Ton, Bunga Potong 7.914.219 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 813.898 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 32.973 Kg, Tanaman Obat 3.784.939 Kg	5.978.768.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	6.397.000.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
19	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 595.712, Jagung 448.375 Ton, Kedelai 7.665 Ton, Kacang Hijau 2.295 Ton, Kacang Tanah 9.018 Ton, Ubi Kayu 84.503 Ton, Ubi Jalar 52.097 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.076.043 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 695.497 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 24.841 Kg, Tanaman Obat 3.368.181 Kg	2.418.642.970	Produksi Padi 613.583 Ton, Jagung 450.617 Ton, Kedelai 7.703 Ton, Kacang Hijau 2.206 Ton, Kacang Tanah 9.063 Ton, Ubi Kayu 84.926 Ton, Ubi Jalar 52.358 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 160.982 Ton, Bunga Potong 6.635.647 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 732.915 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 27.300 Kg, Tanaman Obat 3.501.735 Kg	8.152.771.000	Produksi Padi 631.990 Ton, Jagung 452.870 Ton, Kedelai 7.742 Ton, Kacang Hijau 2.217 Ton, Kacang Tanah 9.108 Ton, Ubi Kayu 85.351 Ton, Ubi Jalar 52.619 Ton, Buah-Buahan 179.875 Ton, Sayuran 422.131 Ton, Bunga Potong 7.246.790 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 772.346 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 30.003 Kg, Tanaman Obat 3.640.584 Kg	4.445.114.000	Produksi Padi 644.630 Ton, Jagung 455.134 Ton, Kedelai 7.781 Ton, Kacang Hijau 2.228 Ton, Kacang Tanah 9.154 Ton, Ubi Kayu 85.777 Ton, Ubi Jalar 52.883 Ton, Buah-Buahan 190.142 Ton, Sayuran 435.662 Ton, Bunga Potong 7.914.219 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 813.898 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 32.973 Kg, Tanaman Obat 3.784.939 Kg	2.767.832.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	7.947.100.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan (Org)	0	30,00	357.020.000	30,00	449.000.000	30,00	347.220.000	30,00	292.708.500	30,00	313.000.000	150,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	produksi peternakan (Kg)	Produksi Daging Sapi 4.639.361 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg, Itik 59.772 Kg	Produksi Daging Sapi 4.822.616 Kg, Babi 16.703.731 Kg, Ayam 2.337.111 Kg, Itik 61.990 Kg	321.180.000	Produksi Daging Sapi 5.013.109 Kg, Babi 17.371.880 Kg, Ayam 2.383.853 Kg, Itik 64.289 Kg	378.020.000	Produksi Daging Sapi 5.211.127 Kg, Babi 18.066.756 Kg, Ayam 2.407.691 Kg, Itik 66.674 Kg	154.446.000	Produksi Daging Sapi 5.315.350 Kg, Babi 18.789.426 Kg, Ayam 2.431.768 Kg, Itik 69.148 Kg	430.953.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	460.600.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
22	Program peningkatan produksi peternakan	produksi peternakan (Kg)	Produksi Daging Sapi 4.639.361 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg, Itik 59.772 Kg	Produksi Daging Sapi 4.822.616 Kg, Babi 16.703.731 Kg, Ayam 2.337.111 Kg, Itik 61.990 Kg	4.065.530.950	Produksi Daging Sapi 5.013.109 Kg, Babi 17.371.880 Kg, Ayam 2.383.853 Kg, Itik 64.289 Kg	2.612.847.800	Produksi Daging Sapi 5.211.127 Kg, Babi 18.066.756 Kg, Ayam 2.407.691 Kg, Itik 66.674 Kg	10.949.803.290	Produksi Daging Sapi 5.315.350 Kg, Babi 18.789.426 Kg, Ayam 2.431.768 Kg, Itik 69.148 Kg	10.574.002.503	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	11.312.000.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	produksi peternakan (Kg)	Produksi Daging Sapi 4.639.361 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg, Itik 59.772 Kg	Produksi Daging Sapi 4.822.616 Kg, Babi 16.703.731 Kg, Ayam 2.337.111 Kg, Itik 61.990 Kg	99.277.000	Produksi Daging Sapi 5.013.109 Kg, Babi 17.371.880 Kg, Ayam 2.383.853 Kg, Itik 64.289 Kg	11.450.000	Produksi Daging Sapi 5.211.127 Kg, Babi 18.066.756 Kg, Ayam 2.407.691 Kg, Itik 66.674 Kg	19.600.000	Produksi Daging Sapi 5.315.350 Kg, Babi 18.789.426 Kg, Ayam 2.431.768 Kg, Itik 69.148 Kg	-	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	3.000.000.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
24	Program penerapan teknologi peternakan	produksi peternakan (Kg)	Produksi Daging Sapi 4.639.361 Kg, Babi 16.061.280 Kg, Ayam 2.313.971 Kg, Itik 59.772 Kg	Produksi Daging Sapi 4.822.616 Kg, Babi 16.703.731 Kg, Ayam 2.337.111 Kg, Itik 61.990 Kg	178.097.080	Produksi Daging Sapi 5.013.109 Kg, Babi 17.371.880 Kg, Ayam 2.383.853 Kg, Itik 64.289 Kg	212.320.000	Produksi Daging Sapi 5.211.127 Kg, Babi 18.066.756 Kg, Ayam 2.407.691 Kg, Itik 66.674 Kg	92.544.500	Produksi Daging Sapi 5.315.350 Kg, Babi 18.789.426 Kg, Ayam 2.431.768 Kg, Itik 69.148 Kg	62.382.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	66.000.000	Produksi Daging Sapi 5.421.657 Kg, Babi 19.541.003 Kg, Ayam 2.456.086 Kg, Itik 71.714 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
26	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi 584.031 Ton, Jagung 446.144 Ton, Kedelai 7.627 Ton, Kacang Hijau 2.184 Ton, Kacang Tanah 8.671 Ton, Ubi Kayu 84.083 Ton, Ubi Jalar 51.838 Ton, Buah-Buahan 152.296 Ton, Sayuran 384.039 Ton, Bunga Potong 5.563.632 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 659.990 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 22.603 Kg, Tanaman Obat 3.239.722 Kg	Produksi Padi 595.712, Jagung 448.375 Ton, Kedelai 7.665 Ton, Kacang Hijau 2.295 Ton, Kacang Tanah 9.018 Ton, Ubi Kayu 84.503 Ton, Ubi Jalar 52.097 Ton, Buah-Buahan 160.982 Ton, Sayuran 396.333 Ton, Bunga Potong 6.076.043 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 695.497 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 24.841 Kg, Tanaman Obat 3.368.181 Kg	-	Produksi Padi 613.583 Ton, Jagung 450.617 Ton, Kedelai 7.703 Ton, Kacang Hijau 2.206 Ton, Kacang Tanah 9.063 Ton, Ubi Kayu 84.926 Ton, Ubi Jalar 52.358 Ton, Buah-Buahan 170.165 Ton, Sayuran 409.026 Ton, Bunga Potong 6.635.647 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 732.915 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 27.300 Kg, Tanaman Obat 3.501.735 Kg	25.000.000	Produksi Padi 631.990 Ton, Jagung 452.870 Ton, Kedelai 7.742 Ton, Kacang Hijau 2.217 Ton, Kacang Tanah 9.108 Ton, Ubi Kayu 85.351 Ton, Ubi Jalar 52.619 Ton, Buah-Buahan 179.875 Ton, Sayuran 422.131 Ton, Bunga Potong 7.246.790 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 772.346 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 30.003 Kg, Tanaman Obat 3.640.584 Kg	-	Produksi Padi 644.630 Ton, Jagung 455.134 Ton, Kedelai 7.781 Ton, Kacang Hijau 2.228 Ton, Kacang Tanah 9.154 Ton, Ubi Kayu 85.777 Ton, Ubi Jalar 52.883 Ton, Buah-Buahan 190.142 Ton, Sayuran 435.662 Ton, Bunga Potong 7.914.219 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 813.898 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 32.973 Kg, Tanaman Obat 3.784.939 Kg	-	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633 Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	5.000.000.000	Produksi Padi 651.077 Ton, Jagung 457.410 Ton, Kedelai 7.820 Ton, Kacang Hijau 2.239 Ton, Kacang Tanah 9.200 Ton, Ubi Kayu 86.206 Ton, Ubi Jalar 53.147 Ton, Buah-Buahan 200.998 Ton, Sayuran 449.633 Ton, Bunga Potong 8.643.119 Tangkai, Bunga Pot dan Taman 857.686 Pohon/Rumpun, Bunga Tabur 36.237 Kg, Tanaman Obat 3.935.018 Kg	Dinas Pertanian dan Peternakan
27	Program peningkatan koordinasi perencanaan	Jumlah koordinasi perencanaan (kali)	0	2,00	-	2,00	320.000.000	2,00	498.920.000	2,00	540.300.000	2,00	760.000.000	10,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
30	Program peningkatan mutu pendidikan dan mutu tenaga pendidik SMK Pertanian pembangunan	Meningkatnya mutu pendidikan dan mutu tenaga pendidik SMK Pertanian (org)	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	391.487.100	2,00	701.000.000	10,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
31	Program peningkatan mutu siswa SMK pertanian pembangunan	Meningkatnya mutu siswa SMK Pertanian (org)	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	500,00	752.059.500	100,00	2.030.000.000	600,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
					20.850.000.000		25.750.000.000		43.823.118.000		35.472.331.000		60.000.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	URUSAN PILIHAN DINAS PERKEBUNAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				11.646.700.000		10.358.972.000		10.669.945.809		13.360.010.000		13.360.010.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perkebunan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perkebunan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	642.729.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	923.107.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	822.083.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.130.590.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.275.414.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perkebunan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perkebunan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perkebunan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	573.815.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.720.705.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.250.750.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.683.317.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	965.743.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perkebunan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Perkebunan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Perkebunan	100%	100%	80.000.000	100%	113.000.000	100%	97.500.000	100%	233.300.000	100%	166.000.000	100%	Dinas Perkebunan
4	Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS				-		-		-		-		-		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perkebunan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	54.432.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	111.863.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	116.795.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	38.300.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	28.710.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perkebunan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			71.380.000		43.626.500		61.796.000		36.472.150		43.737.500		Dinas Perkebunan
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Jumlah partisipasi Dinas Perkebunan dalam Perayaan Penyelenggaraan hari besar; Jumlah MOU antar pelaku usaha komoditi perkebunan			-		-		-	1 Paket	55.753.500	1 paket	50.583.000		Dinas Perkebunan
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya jumlah petani yang terlatih dan profesional		1 keg	71.472.000	180 Omg	142.152.000	9 paket	562.007.000		558.684.750	11 paket	666.620.000		Dinas Perkebunan
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya produksi dan mutu komoditi perkebunan; Meningkatnya NTP perkebunan, nilai ekspor komoditi perkebunan		1 paket	204.755.000	2 paket	169.382.000	3 paket	234.344.500		154.875.400	4 paket	331.000.000		Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan; Meningkatnya NTP perkebunan, nilai ekspor komoditi perkebunan		14 paket	3.176.494.000	2 keg	8.103.939.000	3 paket	10.360.739.000		7.753.907.000	3 paket	8.432.773.000		Dinas Perkebunan
17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani dan masyarakat; NTP perkebunan meningkat		2 even	105.809.500	1 even	76.117.000	1 even	336.855.000		88.049.000	1 even	96.840.000		Dinas Perkebunan
18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meninikhtnya jumlah ekspor komoditi perkebunan, NTP perkebunan meningkat		12 paket	213.713.000	5 paket	217.948.000	21 paket	972.700.000		808.397.000	24 unit	1.685.184.000		Dinas Perkebunan
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan		1 keg	105.400.000	1 keg	98.160.000	1 keg	106.231.500		41.073.000	2 paket	359.544.800		Dinas Perkebunan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Program Pemberdayaan Petani Dan Nelayan	Jumlah petani yang menerapkan teknologi; meningkatnya kesejahteraan petani; NTP perkebunan meningkat						4 paket	304.506.000		207.729.000	8 paket	221.405.000		Dinas Perkebunan
27	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan	Tersusunnya program dan kegiatan pembangunan perkebunan						12 bln	227.197.000		150.990.000	1 keg	277.895.000		Dinas Perkebunan
29	Program Perluasan Areal Dan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan	Prosentasi pemanfaatan lahan potensial						12 bln	516.496.000		965.404.000	10 paket	398.550.000		Dinas Perkebunan
					5.300.000.000		11.720.000.000		16.970.000.000		13.906.842.000		15.000.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PILIHAN														
1.1.	DINAS KEHUTANAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				9.804.583.000		11.833.100.000		9.620.662.058		12.014.580.000		12.014.580.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kehutanan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kehutanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	901.854.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.296.030.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.547.230.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.368.249.150	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.461.935.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kehutanan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kehutanan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kehutanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.681.652.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.622.949.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.471.209.400	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.810.122.233	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.199.188.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kehutanan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Kehutanan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Kehutanan	100%	100%	54.150.000	100%	67.650.000	100%	89.480.000	100%	120.050.000	100%	141.250.000	100%	Dinas Kehutanan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kehutanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	46.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	87.300.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	208.515.428	Tidak ada pengaduan masyarakat	65.390.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	286.551.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kehutanan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan			59.918.000		107.924.000		163.331.400		127.132.300		125.773.200		Dinas Kehutanan
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan				-		-		131.650.000		21.468.467		23.938.467		Dinas Kehutanan
15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan	- Terbentuknya kelembagaan KP/HPL -Teridentifikasinya permasalahan tenurial kawasan hutan. -Tersedianya data potensial sumber daya hutan. -Teridentifikasinya lokasi persuteraan di kabupaten/ kota.	-	50%	499.547.900	50% / 6 Plot	1.155.796.400	50% / 5 Lokasi / 6 Plot	1.523.827.716	50% / 6 Lokasi / 6 Plot	1.107.475.350	100% / 6 Lokasi / 6 Plot	1.382.986.350	100%	Dinas Kehutanan
16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Terehabilitasinya hutan dan lahan kritis		1950 Ha	834.872.000	929 Ha	2.156.035.000	753 Ha	1.991.881.200	442 Ha	1.051.193.700	690 Ha	1.973.148.950	4751 Ha / 69%	Dinas Kehutanan
17	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terkendalanya gangguan keamanan hutan dan pelaku tindak pidana kehutanan	-	Tindak lanjut 10% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	150.733.500	Tindak lanjut 10% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	223.355.000	Tindak lanjut 10% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	388.755.000	Tindak lanjut 10% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	578.161.000	Tindak lanjut 10% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	838.823.400	Tindak lanjut 50% terhadap gangguan keamanan dan pelaku tindak pidana	Dinas Kehutanan
19	Program Pembinaan Dan Peningkatan Industri Hasil Hutan	Tersedianya data dan informasi pelaku industri hasil hutan dan pemasaran	-	3 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	320.772.200	8 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	283.813.600	8 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	468.526.456	11 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	310.046.800	11 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	517.076.800	41 IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)	Dinas Kehutanan
20	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Terbangunnya Taman Hutan Raya sebagai taman kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	1 Unit/Keg	1.037.146.000	1 Unit/Keg	2.341.166.000	1 Unit/Keg	927.786.000	1 Unit/Keg	1.276.539.000	1 Unit / 4 Kegiatan	Dinas Kehutanan
	Program Pemantapan Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 Km	443.247.550	42%	Dinas Kehutanan
					4.550.000.000		8.038.000.000		12.325.573.000		7.487.075.000		9.670.458.517		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PILIHAN														
1.1.	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKAN AN DAN KEHUTANAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				4.960.137.000		6.557.910.000		5.542.491.255		6.921.250.000		7.959.437.500		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Bakorluh ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Bakorluh	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	513.485.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	728.025.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	870.158.100	Tidak ada pengaduan masyarakat	660.363.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	744.590.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Bakorluh
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Sekretariat Bakorluh ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Sekretariat Bakorluh	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.226.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	871.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	829.850.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	855.435.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.923.610.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Bakorluh
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Sekretariat Bakorluh yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Sekretariat Bakorluh	100%	100%	22.500.000	100%	79.750.000	100%	35.100.000	100%	65.050.000	100%	93.000.000	100%	Sekretariat Bakorluh
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Bakorluh	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	13.950.000	-	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	13.965.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	213.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Sekretariat Bakorluh
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	18 Laporan	18 Laporan	108.535.000	18 Laporan	74.500.000	18 Laporan	48.580.000	18 Laporan	48.400.000	18 Laporan	82.000.000	18 Laporan	Sekretariat Bakorluh
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Meningkatnya kesadaran sebagai warga negara yang baik	-	-	-	-	-	1 Kali	61.000.000	1 Kali	65.650.000	1 Kali	80.000.000	1 Kali	Sekretariat Bakorluh
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan penyuluhan pada publik	1250 penyuluh	1250 penyuluh	1.485.430.000	1250 penyuluh	2.443.869.000	1250 penyuluh	2.668.167.200	1250 penyuluh	2.516.634.000	1250 penyuluh	1.803.735.000	1250 penyuluh	Sekretariat Bakorluh
25	Program Pemberdayaan Petani dan Nelayan	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	104,27	104,27	1.262.650.000	101,04	488.385.000	98,21	676.490.000	99,99	1.122.174.500	99,99	604.000.000	99,99	Sekretariat Bakorluh
26	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	439.480.000	15 Kab/Kota	522.740.000	15 Kab/Kota	485.754.300	15 Kab/Kota	163.737.000	15 Kab/Kota	530.462.000	15 Kab/Kota	Sekretariat Bakorluh
27	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan	Rumusan perencanaan program dan kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	427.970.000	2 Dokumen	422.231.000	2 Dokumen	374.900.400	3 Dokumen	362.681.000	3 Dokumen	425.603.000	3 Dokumen	Sekretariat Bakorluh
					5.500.000.000		5.631.000.000		6.050.000.000		5.874.090.000		6.500.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					6.090.657.000		7.184.290.000		5.901.984.774		7.647.000.000		7.857.500.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	856.045.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	813.375.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.167.698.350	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.126.463.540	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.395.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.969.642.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.048.360.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.853.412.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.315.974.890	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.689.780.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	100%	100%	40.000.000	100%	90.000.000	100%	34.300.000	100%	41.850.000	100%	78.000.000	100%	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	Tidak ada pengaduan masyarakat	63.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	178.818.000	-	-	-	50.000.000	-	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	4 laporan	5 laporan	44.530.000	5 laporan	97.150.000	5 laporan	74.178.500	5 laporan	76.185.200	6 laporan	105.020.000	6 laporan	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Cakupan informasi pemberdayaan masy melalui pameran promosi : jumlah meteri yang dipamerkan	-	-	-	-	-	1 kegiatan 100%	68.390.200	1 kegiatan 100%	71.568.750	1 kegiatan 100%	80.000.000	1 kegiatan 100%	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Cakupan Ijin Usaha Pertambangan beroperasi sesuai aturan pertambangan	155	156	691.535.000	166	570.218.000	166	853.440.000	161	655.293.960	161	1.522.000.000	161	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
16	Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Cakupan informasi kawasan yang berpotensi merusak lingkungan	-	2 peta	45.115.000	2 peta	97.225.000	2 peta	112.489.955	2 peta	81.324.650	2 peta	260.000.000	2 peta	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	60%	70%	667.301.000	70%	384.812.000	75%	1.426.149.700	80%	377.177.050	85%	895.000.000	85%	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
18	Program pembinaan dan pengembangan minyak dan gas bumi	Cakupan jumlah pengusaha minyak dan gas bumi beroperasi sesuai aturan/standar perundang-undangan	43	43	382.035.000	45	414.635.000	46	644.699.500	46	446.838.210	50	985.000.000	50	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
19	Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumber daya mineral	meningkatkan potensi pemanfaatan sumber daya mineral/ geologi untuk pengembangan usaha pertambangan (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan wilayah usaha pertambangan)	12 Kab/ kota	12 Kab/ kota	296.650.000	12 Kab/ kota	263.655.000	13 Kab/ kota	2.248.618.950	13 Kab/ kota	624.362.600	13 Kab/ kota	1.270.000.000	13 Kab/ kota	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
20	Program peningkatan kualitas dan arus informasi	meningkatkan potensi pemanfaatan sumber daya energi, sumber daya mineral dan air tanah untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat (cakupan kab/ kota yang dapat mengembangkan usaha bidang ESDM)	12 Kab/ kota	12 Kab/ kota	107.146.500	12 Kab/ kota	157.570.000	13 Kab/ kota	162.088.500	13 Kab/ kota	178.830.350	13 Kab/ kota	200.000.000	13 Kab/ kota	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
21	Program pembangunan pengembangan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	60%	70%	5.700.000.000	70%	3.000.000.000	75%	10.275.715.545	-	-	-	800.000.000	-	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
24	Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur di sektor energi dan sumberdaya mineral	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di sektor energi dan sumberdaya mineral (cakupan aparatur yang memiliki pengetahuan yang komprehensif di sektor energi dan sumber daya mineral	15	-	-	-	-	-	-	20	226.290.800	20	520.000.000	20	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
					10.800.000.000		7.000.000.000		20.099.999.700		5.222.160.000		10.850.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PILIHAN														
1.1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				9.175.302.000		10.745.060.000		8.976.026.933		11.167.070.000		12.500.000.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.017.950.476	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.119.490.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.378.334.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.106.418.200	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.200.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	902.700.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.431.932.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.902.785.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.329.503.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.600.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	100%	112.250.000	100%	151.100.000	100%	147.650.000	100%	204.250.000	100%	300.000.000	100%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	73.800.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	88.508.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	126.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	208.791.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	300.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Kelautan Dan Perikanan
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	3 laporan	3 laporan	353.351.000	5 laporan	222.682.000	6 laporan	93.974.000	8 laporan	64.848.500	8 laporan	100.000.000	8 laporan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	Dinas Kelautan Dan Perikanan
15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	97	101	393.500.000	103	488.300.000	105	773.175.000	105	855.153.000	106	1.600.000.000	106	Dinas Kelautan Dan Perikanan
16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Jumlah POKMASWAS	77 Kimk	100 Kimk	141.360.000	110 Kimk	283.880.000	125 Kimk	395.680.000	150 Kimk	146.390.500	200 Kimk	175.000.000	200 Kimk	Dinas Kelautan Dan Perikanan
17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah kerjasama pengendalian IUU Fishing	1 kegiatan	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	65.750.000	1 kegiatan	21.850.000	1 kegiatan	17.970.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Cakupan koordinasi upaya mitigasi dan prakiraan iklim	1 lokasi	2 lokasi	52.250.000	3 lokasi	53.500.000	4 lokasi	125.000.000	4 lokasi	150.000.000	4 lokasi	200.000.000	4 lokasi	Dinas Kelautan Dan Perikanan
20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi budidaya	98.503	139.090	1.140.550.000	199.320	1.681.950.000	460.950	4.579.782.500	567.100	5.398.641.000	697.694	9.000.000.000	697.694	Dinas Kelautan Dan Perikanan
21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi tangkap	222.221	364.867	8.302.188.524	430.212	11.057.322.000	234.953	11.527.267.000	239.804	13.903.604.000	244.542	15.000.000.000	244.542	Dinas Kelautan Dan Perikanan
22	Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan	Cakupan kegiatan pembinaan pada masyarakat nelayan	3 kegiatan	5 kegiatan	485.000.000	7 kegiatan	1.219.496.000	8 kegiatan	898.391.000	9 kegiatan	957.685.000	10 kegiatan	1.000.000.000	10 kegiatan	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah ekspor perikanan (nilai ekspor)	96.094.118	15.000	125.000.000	125.000	125.800.000	135.000	173.000.000	140.000	280.480.000	155.000	350.000.000	155.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
25	Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah pulau yang teridentifikasi potensinya	1	3	827.600.000	4	427.790.000	6	1.219.795.000	10	5.960.170.000	15	6.000.000.000	15	Dinas Kelautan Dan Perikanan
26	Program peningkatan koordinasi perencanaan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah koordinasi dengan kab/kota	2 kegiatan	3 kegiatan	-	3 kegiatan	-	3 kegiatan	913.315.000	5 kegiatan	1.200.000.000	10 kegiatan	1.500.000.000	10 kegiatan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
27	Program pengembangan peningkatan mutu laboratorium perikanan	Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	3.000	-	3.500	-	3.900	125.890.000	4.500	599.020.500	5.000	800.000.000	5.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
28	Program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah Sertifikat Kesehatan (HC)	2700	3.000	-	3.500	-	3.900	614.758.300	4.500	54.570.000	5.000	150.000.000	5.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program peningkatan koordinasi perencanaan SKPD terkait Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi perencanaan SKPD terkait Kelautan dan Perikanan	3 kegiatan		-		-		-	3 kegiatan	179.482.800	3 kegiatan	200.000.000	3 kegiatan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					13.957.500.000		19.417.500.000		27.016.647.000		34.616.978.000		42.545.000.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
Belanja Pegawai					7.348.325.000		8.629.590.000		6.766.871.132		8.470.680.000		9.317.748.000		
BELANJA LANGSUNG															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.140.577.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	977.180.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.656.000.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	1.880.980.700	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; Indeks Kepuasan Masyarakat- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	805.400.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	2.143.230.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	4.307.280.500	Tidak ada pengaduan masyarakat	6.354.314.800	Tidak ada pengaduan masyarakat	3.000.000.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	100%	48.300.000	100%	91.600.000	100%	76.000.000	100%	109.000.000	100%	300.000.000	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tidak ada pengaduan masyarakat	Tidak ada pengaduan masyarakat	87.500.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	228.200.000	Tidak ada pengaduan masyarakat	24.400.000	-	-	-	50.000.000	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/ tahun sesuai peraturan perundangan	2 Laporan	2 Laporan	150.920.000	2 Laporan	170.170.000	2 Laporan	94.950.000	2 Laporan	69.263.500	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
7	Program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ kedaerahan	Jumlah Pameran HUT Provinsi per tahun (Kegiatan)	2	-	-	-	-	-	-	1	51.845.000	1	100.000.000	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian pengaduan/ sengketa (%)	-	100%	532.433.000	100%	578.625.000	100%	794.944.000	100%	831.844.000	100%	3.536.200.000	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16,30	16,47		16,64		16,81		16,98		17,16		17,16	
		Pelayanan Tera dan Tera ulang alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Jumlah UTPP)	13.373	13.774		14.187		14.613		15.051		15.503		15.503	
16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Jumlah Unit Usaha (UU);	9.088	9.542	1.010.160.000	10.020	857.560.000	10.520	1.302.588.500	11.047	841.592.000	11.599	6.130.000.000	11.599	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
		Jumlah Tenaga Kerja (org);	31.569	32.832		34.145		35.511		36.931		38.409		38.409	
		Nilai Investasi (Rp. Miliar)	76,6	80,4		84,4		88,7		93,1		97,8		97,8	

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Nilai Ekspor (US\$ Juta)	586,7	621,9	1.428.090.000	659,2	1.795.635.000	698,8	1.074.866.500	740,7	3.392.563.500	785,2	4.314.000.000	785,2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,7	7,78	82.200.000	7,85	105.900.000	7,93	897.000.000	8,01	833.666.000	8,09	6.269.530.000	8,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
18	Program Penataan Struktur industri	Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,7	7,78	46.400.000	7,85	508.250.000	7,93	1.700.620.000	8,01	1.402.022.000	8,09	5.100.000.000	8,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persediaan kebutuhan barang pokok dan stok kebutuhan barang strategis (Laporan Prognosa)	Cukup Tersedia	Cukup Tersedia	1.000.000.000	Cukup Tersedia	576.650.000	Cukup Tersedia	3.182.100.000	Laporan Prognosa	1.706.642.500	Laporan Prognosa	3.720.000.000	Laporan Prognosa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Nilai PDRB Sektor Industri (%)	7,7	7,78	68.020.000	7,85	67.000.000	7,93	214.250.000	8,01	-	8,09	100.000.000	8,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
21	Program Pembinaan Standarisasi dalam rangka reakreditasi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (%)	16,30	16,47	50.000.000	16,64	-	16,81	-	16,98	-	17,16	200.000.000	17,16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya volume ekspor Sulawesi Utara											5.000.000.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus KEK Bitung										KEK Bitung	30.000.000.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulut
					6.450.000.000		8.100.000.000		15.325.000.000		17.473.734.000		70.069.730.000		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				1.486.760.000		1.537.260.000		1.388.406.000		1.666.335.000		1.666.335.000		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA LANGSUNG															
					-		-		-		-		-		

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2010)	Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2015)	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN WAJIB														
1.1.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH														
BELANJA TIDAK LANGSUNG															
	Belanja Pegawai				11.502.081.000		11.502.081.000		11.782.323.000		13.526.690.000		13.526.690.000		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BELANJA LANGSUNG					-		-		-		-		-		